

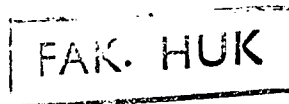
INTI PENGETAHUAN **REPELITA**



14 MAR 1980

oleh :

Drs C.S.T. Kansil S.H.



AKAAN
UM U.I.

598

n

Penerbit : ERLANGGA — Kramat IV/11 Djakarta



Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo FHUI

Buku ini harus dikembalikan pada :

(Keterlambatan pengembalian pada tanggal dibawah ini dikenakan denda Rp. 500.- (perhari/buku)

[illegible]

INTI PENGETAHUAN

REPELITA

(RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969-1973)

Untuk : Peladjar/Mahasiswa/Umum



oleh :

Drs C.S.T. Kansil S.H. 1 4 MAR 1980

Tjetakan ke II
1970

FAK. HUK

Penerbit : ERLANGGA — Kramat IV/11 Djakarta

B-1 sm
10+5 sm
10+5 sm

Tjetakan Pertama : April 1969
Tjetakan Kedua : April 1970



PERPUSTAKAAN FAK. HUKUM U.I.
Tanggal : 20-3-1980.
No. Silsilah : 4830/80

FAK. HUK

DAFTAR ISI

	Halaman
SEKAPUR SIRIH	4
BAB I. Rentjana-Rentjana Pembangunan Nasional Berentjana di Indonesia	5
BAB II. Garis-Garis Besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pertama 1969 - 1973 (REPELITA)	12
BAB III. Sistimatik Buku Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pertama 1969 - 1973	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
I. Pendjelasan Presiden Republik Indonesia kepada para Gubernur/Kepala Daerah seluruh Indonesia dalam rangka penjurusan Repelita	28
II. Pola Dasar Program Umum Nasional	37
III. Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun ...	43
IV. Keputusan Presiden R.I. No. 319 tahun 1968 tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun	61
V. Bagan (schema) Pola Dasar Program Umum Nasional dan Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun	63

SEKAPUR SIRIH

Mulai 1 April 1969 segenap Bangsa Indonesia bergerak maju melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pertama 1969 - 1973 (REPELITA) dalam rangka melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia menudju kepada suatu tata masjarakat jang adil dan makmur.

Untuk itulah buku ketjil ini disusun dengan maksud sekedar membantu Pemerintah memberikan pendjelasan dan menjebar-luaskan pengertian umum tentang REPELITA kepada setiap Warga Negara Indonesia jang berhak dan berkewadajiban melaksanakan Rentjana Pembangunan Nasional tersebut.

Bahan ramuan buku ini adalah berdasarkan dan berintikan bahan-bahan otentik jang berupa :

- a. Pendjelasan Presiden Republik Indonesia didepan Badan Pekerdja M.P.R.S. pada 29 Pebruari 1968 ;
- b. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia didepan Sidang DPR-GR pada 16 Agustus 1968 ;
- c. Laporan Presiden Republik Indonesia pada achir tahun 1968 kepada seluruh Rakyat Indonesia ;
- d. Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 - 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III.

Semoga buku jang hampir tak berarti ini dapat kiranja membantu mengsükseskan REPELITA dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat mentjapai masjarakat jang makmur dan sedjahtera.

Djakarta, 1 April 1969
Penjusun

SEKAPUR SIRIH

Pada tjetakan ke-II

Berhubung dengan mendesaknja waktu untuk mengimbangi besarnja arus permintaan masjarakat agar buku ini ditjetak-ulang, maka tjetakan ke-II buku ini sama dengan tjetakan ke-I.

Djakarta, 1 April 1970

Penjusun
Drs C.S.T. Kansil S.H.

RENTJANA² PEMBANGUNAN NASIONAL BERENTJANA DI INDONESIA.

1. GAGASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Isi daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lukisan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Rakyat Indonesia yang telah berabad-abad lamanya didjadjah oleh Belanda dan kemudian oleh Djepang, mengalami penderitaan bathin dan djasmaniah yang amat berat. Oleh karena itu pada saat hendak memproklamasikan kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air diamanatkan kepada kita oleh rakyat Indonesia tiga hal, yakni :

- a. mentjiptakan, masjarakat adil dan makmur ;
- b. mendirikan negara Kesatuan berbentuk Republik ;
- c. menganut tjara musjawarah melalui sistim suatu badan perwakilan yang bersifat uni-kameral.

Dalam usaha untuk mewujudkan dan memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat itu pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan suatu Maklumat Pemerintah kepada rakyat Indonesia mengenai „Pembangunan Negara Indonesia”.

Isi Maklumat Pembangunan Negara Indonesia itu adalah antara lain :

- I. „Pembangunan Negara Indonesia Merdeka yang dikehendaki oleh rakyat sekalian diwaktu ini sedang didjalankan dengan saksama ;
- II. Segala hal-hal yang perlu untuk Pembangunan Negara Republik Indonesia sedang diselenggarakan dan akan selesai diwaktu yang pendek”.

Sedjak Proklamasi kemerdekaan hingga saat sekarang ini Pembangunan Negara Indonesia berdjalan terus dengan mengalami pasang-surut.

2. USAHA PEMIKIRAN TENTANG PEMBANGUNAN NEGARA

a. **Braintrust.**

Dalam periode revolusi physik usaha pemikiran kearah Pembangunan Negara dilakukan oleh suatu Lembaga Pemikiran Pembangunan Negara R.I. jang disebut Braintrust.

b. **Dewan Perantjang Negara.**

Dalam periode-survival usaha pemikiran kearah Pembangunan Negara itu dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Perentjana jang kemudian diubah mendjadi Dewan Perantjang Negara.

Dewan itu mempunyai suatu Sekretariat jang disebut Biro Perantjang Negara (B.P.N.), dibawah pimpinan seorang Direktur Djenderal jang langsung berada dibawah pengawasan Perdana Menteri R.I. Dewan itu telah berhasil menjusun Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1956 — 1960), jang hanja meliputi bidang Sosial-Ekonomi. Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu baru berdjalan kira-kira 3 tahun dan belum menundjukkan hasil jang konkrit karena keadaan Negara mendjadi bertambah sukar.

c. **Dewan Perantjang Nasional (Depernas).**

Dalam masa perkembangan keadaan masjarakat dan negara serba tidak memuaskan lahirlah gagasan „Demokrasi Terpimpin”. Dan dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu dibentuklah Dewan Perantjang Nasional dengan Undang-Undang No. 80 tahun 1958.

Tugas pokok dari Depernas ialah untuk mempersiapkan rantjangan Undang-Undang Pembangunan Nasional jang berentjana.

Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Depernas disempurnakan dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959.

Dalam djangka waktu 1 tahun Depernas berhasil menjusun Naskah Rantjangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun (1961 — 1969). Pola Pembangunan Nasional Semesta itu disampaikan oleh Depernas kepada Presiden pada 13 Agustus 1960. Kemudian Rantjangan itu diteruskan kepada M.P.R.S. untuk mendapat pengesahan.

Dalam sidangnja jang pertama M.P.R.S. menetapkan Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961 — 1969 itu sebagai „GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA TAHAPAN PERTAMA 1961 — 1969”.

Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 itu terkenal dengan nama „Haluan Pembangunan Negara Republik Indonesia”. Pola Pembangunan itu merupakan pimpinan bagi setiap usaha perekonomian dan merupakan dasar segala pembangunan diseluruh pelosok tanah air pada waktu itu.

3. POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA

Tata-perentjanaan

Dalam beberapa tahun sesudah pengakuan kemerdekaan belumlah tampak kemadjuan pembangunan ditanah air kita. Perasaan tidak puas atas hasil jang ditjapai dan ketjemasan berhubung dengan keadaan Negara mengakibatkan rangkaian usaha-usaha dari Presiden untuk mengatasi keadaan itu. Dalam hubungan itu dilantjarkanlah :

- (1) **Konsepsi Presiden,**
- (2) **Gagasan Demokrasi Terpimpin, dengan pembentukan :**
 - a. Kabinet Karya,
 - b. Dewan Nasional (Denas),
 - c. Penjelenggaraan Musjawarah Nasional (Munas), dan
 - d. Penjelenggaraan Musjawarah Nasional Pembangunan (Munap).

Dalam rangka pelaksanaan sistim Demokrasi Terpimpin itu didirikan Dewan Perantjang Nasional.

Tugas Depernas adalah : untuk merantjang „Pola Pembangunan masyarakat adil dan makmur atau masyarakat SOSIALISME INDONESIA”.

Adapun TUDJUAN itu harus ditjapai dengan : **Pembangunan Nasional, Semesta, Berentjana :**

- | | |
|----------|--|
| Nasional | : karena pola Pembangunan itu harus menggambarkan keinginan seluruh daerah dan seluruh lapisan dan golongan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. |
| SEMESTA | : karena pola tersebut harus meliputi seluruh lapangan hidup bangsa dan negara. |

BERENTJANA : karena tidak mungkin tertjapai pelaksanaan masjarakat adil dan makmur sekaligus, akan tetapi dilaksanakan setapak demi setapak, tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, daerah demi daerah, lapangan demi lapangan, dengan perkataan lain : tidak sekaligus, tetapi setjara berentjana, namun dengan tjepat dan deras sesuai dengan irama gelombang Revolusi Indonesia.

Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu merupakan TRI-POLA, karena terdiri atas 3 pola, jaitu :

- (1). pola projek,
- (2). pola pendjelasan dan
- (3). pola pembiajaan.

Dalam pekerdjaannja Depernas selalu berpedoman pada beberapa naskah nasional jaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Amanat Pembangunan Presiden 28-8-1959 (jang tertulis dan jang diutjapkan),
3. Penegasan Amanat Pembangunan Presiden (9-1-1960).

Dalam ketiga naskah itu telah ditentukan, bahwa tudjuan seluruh pembangunan adalah untuk mewudjudkan Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu : „mentjiptakan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur menurut adjaran Pantjasila”.

4. **SISTIMATIK POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA
BERENTJANA TAHAPAN PERTAMA : 1967 — 1969.**

Adapun Naskah Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana delapan tahun : 1961 — 1969 itu semula terdiri atas 5100 halaman : setelah ditjetak mendjadi suatu rangkaian buku jang seluruhnja terdiri atas 4647 halaman.

Seluruh bahan diatur dalam sistimatik angka-angka Proklamasi jang sakti, jaitu :

„17 (Djilid) — 8 (buku) — 1945 (Paragraf)”.

Keseluruhan bahan dibagi dalam 8 buku, jaitu :

- Buku pertama : berisi pokok-pokok Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.
- Buku kedua : berisi Rantjangan Bidang Pokok Projek Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.
- Buku ketiga : Bidang Mental/Rochani dan Penelitian.
- Buku keempat : Bidang Kesedjahteraan, Pemerintah dan Keamanan/Pertahanan.
- Buku kelima : Bidang Produksi.
- Buku keenam : Bidang Distribusi.
- Buku ketudjuh : Bidang Keuangan.
- Buku kedelapan : Uraian Menteri-Menteri, Lampiran-lapiran.

Kedelapan Buku itu dibagi lagi dalam 17 djilid :

- Djilid I : Pendahuluan,
- Djilid II : Sosialisme Indonesia, Tripola Pembangunan, Pola Projek.
- Djilid III : Garis Besar Pembangunan, Pola Pembangunan, Pelaksanaan dan Penutup.
- Djilid IV : Pola Pendjelasan bidang :
 - Kemasjarakatan
 - Ekonomi/Keuangan,
 - Sandang-Pangan,
 - Bidang pokok projek Pembangunan.
- Djilid V : Kebudajaan dan Pendidikan.
- Djilid VI : Pendidikan.
- Djilid VII : Pendidikan tenaga pembangunan.
- Djilid VIII : Penelitian.
- Djilid IX : Penelitian.
- Djilid X : Penelitian.
- Djilid XI : Kesedjaheteraan Rakjat.
- Djilid XII : Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan.
- Djilid XIII : Pangan dan Sandang.
- Djilid XIV : Industri, termasuk Obat-obatan.
- Djilid XV : Distribusi, Komunikasi dan Tourisme.
- Djilid XVI : Keuangan.
- Djilid XVII : Uraian Menteri-Menteri. Lampiran.

5. PELAKSANAAN POLA PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pada tanggal 1 Djanuari 1961 Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama itu setjara simbolis mulai dilaksanakan dengan ajunan tjangkul pertama oleh Presiden Republik Indonesia bertempat dihalaman Gedung Proklamasi di Djalan Pegangsaan Timur 56 Djakarta. (Sekarang Djalan Proklamasi 56).

Tanggal 1 Djanuari oleh Pemerintah waktu itu ditetapkan sebagai Hari Pembangunan Nasional.

Agar setiap warganegara dan setiap orang asing dapat mengetahui apa jang sudah, sedang atau akan dibangun oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama (1961 — 1969) itu, maka ditempat bekas Gedung Proklamasi di djalan Pegangsaan Timur 56 Djakarta didirikan sebuah gedung jang indah, jang disebut Gedung Pola. Tepat ditempat pentjangkulan pertama itu didirikan sebuah tugu jang berbentuk sebuah linggis.

Dalam Gedung Pola itu dipamerkan pola-pola, dan maket-maket daripada projek-projek pembangunan diseluruh Indonesia waktu itu.

Beberapa projek pembangunan jang lebih merupakan „projek prestise” adalah misalnja :

- a. Projek Djatiluhur untuk pembangkit tenaga listrik dan pengairan (irigasi).
- b. Projek Asahan, djuga untuk pembangunan tenaga listrik dan pengairan.
- c. Gelanggang Olah Raga „SENAJAN” suatu kompleks bangunan jang meliputi antara lain : Stadion Utama (100.000 penonton), Istana Olah Raga (10.000 penonton), kolam renang moderen, dan gedung-gedung serta lapangan-lapangan untuk tjabang-tjabang olah-raga jang penting.
- d. Monument Nasional (111 meter tingginja), jang dipuntjaknja terdapat „Api Njala Revolusi” dan didasarnja akan terdapat Museum Sedjarah (antara lain tempat penjinan Sang Saka Dwi Warna dan Naskah Proklamasi Kemerdekaan).
- e. Mesdjid Istiqlal dan lain-lain.

Sesuai dengan politik luar negeri Negara kita pada waktu itu maka untuk melaksanakan pembangunan itu, Indonesia menerima bantuan dari negara-negara sahabat misalnja : Amerika Serikat, Uni Sovjet, Perantjis, Djepang dan sebagainya.

Adapun Projek-projek Pembangunan itu dibagi dalam dua golongan, jaitu :

- I. Projek A, ialah projek-projek pembangunan guna menambah kesedjahteraan rakyat.
Dalam golongan ini seluruhnja ada 335 projek ;
- II. Projek B, ialah projek-projek pembangunan jang akan menghasilkan pendapatan guna membiayai pelaksanaan projek-projek A.
Golongan B itu terdiri atas 8 projek, yakni :
Minjak Bumi, Kaju, Perikanan Laut, Kopra, Karet, Timah, Aluminium dan Tourisme.

Nialai daripada Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama itu adalah 240 milyar rupiah.

Tjatatatan :

- Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 — 1969 ini, kemudian ternyata tidak dapat dilaksanakan, berhubungan dengan perobahan situasi (Orde Baru) dinegara Republik Indonesia para achir tahun 1965.
- Ketetapan MPRS No. : II/MPRS/1960 jang memuat pola pembangunan nasional berentjana 1961 — 1969, kemudian telah ditjabut kembali oleh MPRS pada tahun 1968 berdasarkan Ketetapan MPRS No. : XXXVIII/MPRS/1968.
Projek² jang sudah dimulai pelaksanaannja berdasarkan Ketetapan MPRS No. : II/MPRS/1960 akan dilandjutkan sesuai dengan ketentuan jang berlaku sekarang.

B A B II

GARIS-GARIS BESAR RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN PERTAMA 1969 — 1973 (REPELITA)

A. DASAR-DASAR HUKUM REPELITA

Untuk melaksanakan Pembangunan Negara perlu terlebih dahulu disusun suatu Rentjana Poloa Pembangunan. Dan agar Rentjana Pembangunan itu dapat berhasil baik mentjapai sasarannja, maka Pembangunan harus dilakukan setjara bertahap dan berentjana, oleh karena harus pula didasarkan pada kenyataan-kenyataan kemampuan jang ada serta landasan perjuangangan Bangsa dan harapan Rakjat setjara keseluruhan. Tanpa rentjana jang konkrit, realistis dan berlandaskan pada aspirasi-aspirasi Rakjat itu, tidaklah mungkin dapat dilaksanakan Pembangunan dengan berhasil dan terarah.

Dewasa ini (1969) Pemerintah Republik Indonesia telah menjusun satu Rentjana Pembangunan Lima Tahun ke-I 1969 — 1973) disingkat REPELITA jang keseluruhannja tersusun dalam 3 Buku (Buku I, Buku II dan Buku III) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaannja.

REPELITA ini akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 dengan pembiajaan keseluruhannja meliputi djumlah sebesar Rp. 1.420.000.000.000,— (Rp. 1.420 Miljard atau Rp. 1,42 Triljun).

Adapun jang mendjadi dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk menjusun REPELITA ini ialah Ketetapan M.P.R.S. No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Dalam Konsiderans Ketetapan M.P.R.S. No. XLI/MPRS/1968 ini ditegaskan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan **Rentjana Pembangunan Lima Tahun** perlu segera dibentuk Kabinet Pembangunan ;
- b. Politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak Rakjat menudju kearah stabilisasi dan Pembangunan Nasional.

Dalam pasal 1 Ketetapan M.P.R.S. ini kemudian disebutkan, bahwa Tugas Pokok Kabinet Pembangunan antara lain ialah :

1. mentjiptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai

sjarat untuk berhasilnja pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum ;

2. menjusun dan melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (ke-I).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Ketetapan M.P.R.S. No. XLI/MPRS/1968 ini, maka Pemerintah (melalui BAPPE-NAS) telah menjusun Rentjana Pembangunan Lima Tahun yang kemudian telah dituangkan dalam bentuk **Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968** yang mulai berlaku tanggal 30 Desember 1968, yang isi pokoknja adalah sebagai berikut :

Pasal 1 : Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III Lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti yang ditugaskan oleh M.P.R.S.

Pasal 2 : Kebidjaksanaan² pelaksanaan daripada REPELITA akan dituangkan dalam Rentjana Tahunan yang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara serta kebidjaksanaan² lainnja.

Pasal 3 : Penuangan dalam Rentjana Tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan memerlukan penjesuaian terhadap REPELITA.

Pada tanggal 14 Djanuari 1969 Presiden Republik Indonesia telah memberikan pendjelasannja tentang REPELITA ini kepada DPR-GR.

Perlu kiranja diketahui, bahwa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ke-II nanti, tidak lagi disusun oleh Pemerintah (seperti halnja dengan REPELITA KE-I) melainkan akan ditetapkan oleh M.P.R. hasil Pemilihan Umum. Dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/1968 pasal 2 disebutkan antara lain, bahwa M.P.R. hasil Pemilihan Umum pada bulan Maret 1973 bersidang untuk menetapkan Rentjana Pola Pembangunan Lima Tahun ke-II

B. POKOK-POKOK PIKIRAN REPELITA

- Rentjana Pembangunan itu disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- p e r t a m a : harus dapat menaikkan penghasilan Rakyat ketjil, sehingga berarti perbaikan hidupnya ;
- k e d u a : disusun berdasarkan keadaan dan kemampuan-kemampuan kita dewasa ini ;
- k e t i g a : sekaligus meletakkan dasar-dasar jang kuat pelaksanaan Pembangunan Nasional selanjutnya.

Mengenai pokok-pokok pikiran tersebut itu, memerlukan pengertian kita semuanya, bahwa kemampuan kita dewasa ini masih terbatas, karena keadaan perekonomian kita memang masih serba terbatas, meskipun kita memiliki potensi-potensi besar jang masih terpendam dan memberikan harapan jang besar. Kenyataan ini memang pahit, akan tetapi harus kita sadari sedalam-dalamnya dan merupakan tantangan bagi kita sekalian. Djelas, bahwa dalam keadaan perekonomian jang sedemikian tadi maka kita tidak banjak memiliki kemungkinan pilihan atau menderjakan pembangunan setjara serentak. Djustru karena itulah kita melakukan pembangunan bertahap, dengan pengertian bahwa tahap jang satu merupakan landasan bagi tahap selanjutnya. Oleh karena itu, Pemerintah mengadjak agar kita semuanya dapat menahan diri ; artinja kita harus dapat dengan bidjaksana dan tepat memadukan antara „harapan” dan „kenyataan”. Harapan kita, — terutama harapan masyarakat dewasa ini — adalah sangat besar ; akan tetapi dilain pihak, kemampuan jang kita miliki adalah sangat terbatas djika dibandingkan dengan keinginan dan harapan-harapan itu.

Melalui serangkaian Rentjana Pembangunan jang masing-masing dengan jangka waktu lima tahun itulah, kita berusaha mewujudkan harapan dan tjita-tjita seluruh Bangsa, jaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, jang merupakan isi daripada kemerdekaan kita.

C. PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAKSANAAN REPELITA

Oleh karena itu, disamping kita harus melihat kenyataan-kenyataan dan kemampuan jang kita miliki dewasa ini, maka perhatian kita sama sekali tidak boleh terlepas dari tjita-tjita jangka pandjang. Dengan sendirinja, landasan Pantja Sila selalu

merupakan prinsip jang harus kita pegang teguh. Dalam hubungan ini, maka demokrasi ekonomi — seperti jang tjiri-tjirinja telah ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII — tetap harus merupakan pembimbing utama daripada Rentjana Pembangunan ini. Prinsip lain jang harus kita pegang teguh adalah prinsip Negara Kesatuan ; hal ini berarti bahwa setiap segi dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan djuga pelaksanaannya, harus senantiasa merupakan kegiatan-kegiatan jang dapat memperkuat kesatuan Indonesia ; baik dalam arti kesatuan politik ; kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kebudayaan maupun kesatuan pertahanan-keamanan.

D. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Pembangunan Lima Tahun jang sekarang ini, sangat sederhana, jaitu : pangan, sandang, perbaikan prasarana, penjediaan perumahan Rakjat, perluasan lapangan pekerdjaan dan kesedjahteraan rohani.

Dalam melaksanakan pembangunan itu, maka titik beratnja dipusatkan pada bidang pertanian. Bidang ini mendapatkan perhatian jang paling besar, oleh karena sebagian besar Rakjat kita adalah petani dan kebutuhan kita akan pangan masih lebih besar daripada apa jang dapat kita hasilkan. Dengan pembangunan dibidang pertanian ini, dengan makin luasnja persawahan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, berarti makin banyak terbuka lapangan pekerdjaan dan makin naik penghasilan Rakjat kita.

Disamping bidang pertanian, bidang industri djuga mendapatkan perhatian, tetapi terbatas pada industri-industri jang menundjang pembangunan bidang pertanian, seperti industri pupuk, semen, alat-alat pertanian dan pengolah hasil pertanian dan sebagainya ; dan industri-industri jang menghasilkan barang-barang pengganti impor jang penting, seperti tekstil, kertas, ban mobil, bahan perumahan dan sebagainya.

Pembangunan hanja dapat berdjalan lantjar apabila djalan-djalan diperbaiki, alat pengangkutan tjukup, pelabuhan-pelabuhan baik dan kapal-kapal laut dapat berdjalan dengan teratur, lapangan-lapangan terbang diperbaiki dan pesawat-pesawat terbang dapat terbang dengan tepat dan aman, telekomunikasi lantjar, listrik dan air minum tjukup dan lain keperluan jang penting.

Oleh karena itu, pembangunan prasarana ini mendjadi perhatian jang besar djuga. Perbaikan prasarana tersebut djuga

akan lebih memperlantjar pembinaan persatuan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia jang berwilajah luas dan berpenduduk sangat besar itu, akan lebih mengeratkan rasa persatuan kita sebagai satu Bangsa dan makin menguatkan perekonomian Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi.

Pembangunan djelas memerlukan biaja jang besar, baik biaja dalam bentuk rupiah maupun devisa. Devisa ini sangat kita perlukan untuk mendatangkan barang-barang, modal, untuk mengimpor bahan-bahan baku, spare-part dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnja jang belum dapat kita hasilkan sendiri. Untuk itu, maka kita harus melakukan pembangunan dibidang-bidang jang paling tjepat dan besar menghasilkan devisa, jaitu perkebunan, pertambangan dan menarik pariwisata asing sebanjak-banjaknja.

Disamping pembangunan dalam bidang ekonomi/materiil tersebut diatas, bidang kesedjahteraan Rakjat dan mental spiri-tuil tidak diabaikan. Dalam batas-batas kemampuan, direntjana-kan pembangunan dibidang Pendidikan, Agama, kesehatan, keluarga berentjana disamping penelitian-penelitian ilmu penge-tahuan dan lain-lain.

Bidang Hankam dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun pertama ini hanja dilakukan usaha-usaha jang bersifat penelitian dan pengembangan dan belum diadakan pembangunan ABRI dalam arti jang sebenarnja.

E. PEMBANGUNAN DIDASARKAN PADA KEMAMPUAN

Sasaran pembangunan kita jang sekarang ini, tampaknja memang sangat sederhana. Akan tetapi, hendaknja kita sadari sedalam-dalamnja, bahwa dibalik kesederhanaannja itu terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi jang luar biasa. Seperti didjelaskan, *bahwa pembangunan kita harus didasarkan kepada keadaan dan kemampuan-kemampuan jang kita miliki dewasa ini.* Membuat suatu rentjana pembangunan jang muluk-muluk memang gampang, akan tetapi melaksanakannja adalah sangat berat. Bahkan, apabila rentjana itu tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita, maka semuanya itu pasti gagal.

Adanja kemampuan jang terbatas tadi, mengharuskan kita untuk dapat dengan pandai dan tepat menentukan bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan jang harus diambeg-paramaartakan. Sebab apabila tidak demikian, maka kemampuan jang terbatas itu akan terbagi-bagi mendjadi sangat ketjil sekali, sehingga achirnja kita tidak dapat membangun apa-apa. Itulah sebabnja, seperti jang

didjelaskan tadi kita menggunakan sistim prioritas dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun yang sekarang ini.

Dalam rangka usaha kita bersama untuk menaikkan kemampuan kita sendiri, maka kita djuga telah mentjapai beberapa kemajuan yang berarti. Hal ini tampak djelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara kita dalam waktu dua tahun yang terachir ini. Dalam tahun 1967, untuk membiyai keperluan rutin sadja, kita masih menutupnja dengan bantuan dari luar negeri. Dalam tahun 1968 semua keperluan rutin telah dapat diyai sepenuhnya dengan pendapatan dalam negeri sendiri. Untuk tahun 1969, diperkirakan $\pm 10\%$ dari pendapatan negara didalam negeri ialah sebesar 24 milyar rupiah, akan dapat digunakan untuk anggaran pembangunan yang biasa dinamakan sebagai tabungan Pemerintah. Inilah kemajuan penting dalam usaha kita untuk menaikkan kemampuan membiyai pembangunan dengan kekuatan kita sendiri; dan diharapkan, bahwa untuk tahun-tahun berikutnya tabungan Pemerintah ini akan bertambah besar (diperkirakan dalam lima tahun akan berdjumlah 226 milyar).

F. PEMBIAJAAN REPELITA

Sebagaimana diketahui, pembiayaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan meliputi sumber-sumber dalam negeri dan sumber-sumber luar negeri.

Sumber-sumber dalam negeri disamping yang berupa tabungan Pemerintah seperti yang telah disebutkan tadi, djuga berupa usaha investasi dari Swasta serta kredit-kredit yang diberikan dari Bank. Sedangkan yang berasal dari luar negeri akan berupa kredit-kredit djangka pandjang yang akan berupa bantuan program maupun bantuan projek.

Djustru karena kemampuan-kemampuan kita yang masih serba terbatas, maka untuk pelaksanaan Rentjana Pembangunan ini, kita masih memerlukan dana-dana luar negeri bagi pembiayaan pembangunan, sepanjang dana-dana tersebut tidak diikuti dengan ikatan-ikatan politik, sedangkan setjara ekonomis dapat dipertanggung-djawabkan.

Kebidjaksanaan ini ditempuh, baik karena tanggung-djawab moril kita kepada generasi yang akan datang; maupun karena prinsip, bahwa pada achirnja pembangunan kita harus mampu dipikul oleh kekuatan kita sendiri.

Sumber-sumber luar negeri yang lain, diperhitungkan akan kita peroleh dari penanaman modal asing, yang dalam waktu

lima tahun jang akan datangan akan makin bertambah besar. Dalam hubungan ini, sekali lagi ditegaskan, bahwa penanaman modal asing itu telah diatur sedemikian, sehingga tidak akan merugikan atau mematikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri.

Dalam tahun 1969/1970, maka pembiajaan pembangunan jang berasal dari anggaran belandja diperkirakan sebesar 123 milyar. Disamping itu akan tersedia kredit-kredit djangka panjang dan menengah dari Bank, dari penanaman modal PN², Swasta dalam negeri dan Swasta asing, jang diperkirakan akan meliputi djumlah 38 milyar, chususnja untuk bidang-bidang industri, pertambangan pertanian dan lain-lain.

Djumlah-djumlah tersebut akan meningkat terus setiap tahunnja, sehingga untuk lima tahun akan mentjapai djumlah $\pm$ Rp. 1.420 milyar, diantaranya Rp. 1.059 milyar berasal dari Anggaran Pembangunan Pemerintah.

Sesuai dengan prioritas jang ada serta biaja-biaja jang diperlukan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan dari sektor Pemerintah, maka pembagian djumlah biaja dari anggaran Negara menurut sektornja dapat didjelaskan sebagai berikut :

Bidang/Sektor	1969/1970	1969/1970 1973/1974
A. Bidang Ekonomi :	94,4	829
1. Pertanian dan irigasi	35,1	319
2. Industri dan Pertambangan	18,3	130
3. Tenaga Listrik	19,9	100
4. Perhubungan dan Pariwisata	27,1	230
5. Desa	3,0	50
B. Bidang Sosial :	19,6	172
1. Kesehatan dan Keluarga Berentjana	4,6	42
2. Pendidikan dan Kebudayaan	10,5	95
3. Sosial dan lain-lain	4,5	35
C. Bidang Umum :	9,3	58
1. Pertahanan dan Keamanan	4,0	28
2. Lain-lain	5,3	30
Djumlah :	123,3	1.059

Beberapa pembangunan yang penting dalam berbagai sektor adalah seperti dijelaskan setjara singkat berikut ini.

G. PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN-EKSPOR

Dibidang pertanian, meliputi usaha-usaha untuk menaikkan produksi bahan pangan dan bahan-bahan ekspor. Tudjuan dibidang pangan adalah, agar dalam waktu lima tahun yang akan datang kita tidak perlu lagi mengimpor beras dan mutu gizi makanan Rakyat Indonesia mendjadi lebih baik. Perlu diketahui, bahwa antara tahun 1953 sampai dengan 1967 yang lampau, rata-rata kita mengadakan impor beras sebesar 100 djuta dollar setahun.

Pada achir Pembangunan Lima Tahun yang akan datang, direntjanakan produksi beras kita akan mentjapai 15,4 djuta ton. Untuk itu, antara lain akan diusahakan perbaikan irigasi yang akan dapat mengairi $\pm$ 900.000 ha sawah dan usaha perluasan yang meliputi $\pm$ 480.000 ha; dengan usaha ini, luas areal panen akan mentjapai 9,3 djuta ha, yang berarti pertambahan sebesar 1,7 djuta ha, djika dibandingkan keadaan dewasa ini. Bersamaan dengan itu, maka penggunaan bibit unggul, jaitu PB-5 dan PB-8 akan ditingkatkan sehingga meliputi 4 djuta ha sawah. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang pertanian ini dibarengi pula dengan usaha-usaha lain, seperti pemberian kredit, penjuluhan bagi para petani, pemasaran dan efisiensi prasarana pelembagaan yang wadjar.

Produksi pupuk akan kita naikkan dari 100 ribu ton pada saat sekarang, mendjadi $\pm$ 1,4 djuta ton untuk berbagai djenis. Demikian pula akan kita naikkan produksi obat hama, alat-alat pertanian (seperti tjangkul, sabit, badjak mesin-mesin penggabah pompa air) karung dan sebagainya.

Sedjalan dengan bertambahnja produksi padi, maka akan kita perbanyak djumlah penggilingan padi dan unit-unit huller.

Dalam rangka memberikan kegairahan kepada petani, maka ditempuh berbagai kebidjaksanaan-kebidjaksanaan yang akan dapat memantapkan harga beras; yang tjukup memberikan keuntungan kepada petani dan harganja terbeli oleh masjarakat. Kenaikan produksi pangan lainnja meliputi: djagung, ketela pohon, ketela rambat, katjang kedele, katjang tanah, sajur-majur, buah-buahan, ikan (perikanan darat dan perikanan laut), unggas dan ternak.

Disamping pembangunan dalam bidang pertanian dalam arti khusus tersebut, maka pembangunan pertanian akan djuga meliputi bidang-bidang perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

Dalam kesemua bidang itu akan terdapat peningkatan kegiatan dan diharapkan akan terdapat hasil-hasil jang meningkat pula, baik untuk ekspor jang akan meningkatkan hasil devisa kita maupun untuk memenuhi kebutuhan di Dalam Negeri.

Perintjian daripada usaha-usaha tersebut serta sasaran-sasaran peningkatan produksi dari tiap-tiap sektor setjara djelas dapat diikuti dalam buku REPELITA.

H. PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN LAIN-LAIN

Mengenai pembangunan dibidang industri, maka sasarannja ialah peningkatan produksi sebesar 90% dalam djangka waktu lima tahun ; terutama dengan usaha-usaha melandjutkan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas riil ; jang disusul dengan perluasan dan pembangunan industri.

Disamping industri jang menundjang pembangunan pertanian seperti jang disebutkan tadi, maka perhatian ditudjukan kepada industri sandang dan industri pengganti barang impor jang mampu kita adakan. Dibidang sandang, maka target kita adalah produksi dalam negeri sebesar 900 djuta M setahun, jang akan kita tjapai pada achir Pembangunan Lima Tahun ini. Industri lainnja adalah pupuk, semen dan kimia, pulp, kertas dan pertjetakan ; pharmasi ; industri ringan dan keradjinan Rakjat ; industri logam, mesin dan peralatan.

Sektor pertambangan jang mendapatkan perhatian adalah minjak dan gas bumi, timah, bauksit, tembaga, nikel emas dan perak, mangaan, belerang, intan dan batu bara. Perlu kita perhatikan, bahwa sedjak perang dunia ke-II usaha-usaha pertambangan jang baru praktis tidak ada di Indonesia.

Oleh karena pengusahaan pertambangan memerlukan modal dan pengetahuan jang besar, risiko jang besar, hasilnja baru dirasakan sesudah waktu jang lama dan harus dapat menemukan sumber-sumber baru, maka terutama karena keterbatasan pembiayaan, Pemerintah terpaksa menempuh kebidjaksanaan mengundang modal asing sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku.

Dibidang tenaga listrik, maka sasarannja adalah peningkatan efisiensi penggunaan pusat-pusat tenaga listrik dan peningkatan pengadaan tenaga listrik jang baru. Dengan demikian penediaan listrik bagi penduduk dapat bertambah dan pertumbuhan ekonomi djuga akan didorong lebih madju.

I. PERHUBUNGAN, PENGANGKUTAN, TELEKOMUNIKASI

Pembangunan disektor perhubungan ditudjukan untuk mentjapai tingkat jang seimbang dengan kenaikan volume produksi dibidang lain. Oleh karena itu, djasa-djasa perhubungan pertama-tama dikerahkan untuk memperlantjar arus lalu-lintas angkutan barang, tanpa mengorbankan kepentingan angkutan penumpang. Lokasi pembangunan dititik-beratkan kepada daerah produksi dengan pelabuhan-pelabuhan, daerah-daerah minus dengan daerah surplus dan untuk menaikkan fasilitas bagi pariwisata. Dalam hal ini, potensi swasta akan didorong dan diikutsertakan dengan maksimal.

Pembangunan jang dilakukan disektor ini akan meliputi djalan-djalan raja, alat-alat pengangkutan didarat, pelabuhan-pelabuhan dan fasilitas-fasilitasnja, lapangan terbang, kereta api dan sebagainya.

Sedjalan dengan pembangunan dibidang pengangkutan tadi, maka djuga dilakukan pembangunan dibidang pos dan giro serta telekomunikasi.

Bidang pariwisata jang djelas merupakan salah satu sumber penghasil devisa, djuga akan dibangun dengan penediaan fasilitas-fasilitas jang diperlukan.

Dari gambaran angka-angka pembiajaan diatas tampak djelas, bahwa sektor-sektor ekonomi mendapatkan pembiajaan jang terbesar. Perlu ditekankan, bahwa hal ini tidak berarti bahwa bidang-bidang jang lain diabaikan. Memang dalam 5 tahun ini kita perlu mengerahkan sebagian terbesar kemampuan jang ada untuk sektor ekonomi, untuk dapat meningkatkan produktivitas dan produksi Nasional, jang berarti akan meningkatnja pendapatan Nasional dan pendapatan perkapita penduduk. Dengan demikian, kegairahan kegiatan-kegiatan masjarakat dalam segala bidang akan meningkat, sehingga pembangunan disektor-sektor lain akan didorong dan diharapkan dikerdjakan oleh masjarakat sendiri.

J. SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, AGAMA

Chusus mengenai sektor pendidikan, perlu dijelaskan bahwa meskipun dalam tahun pertama Pembangunan Lima Tahun, sektor pendidikan dan kebudayaan hanya mentjapai 8,5% dari Anggaran Pembangunan, akan tetapi biaya pendidikan dalam arti luas, bukan hanya meliputi pendidikan pada sekolah-sekolah umum dan perguruan-perguruan tinggi sadja; melainkan meliputi sektor-sektor lain, seperti peningkatan ketrampilan dan ketjerdasan, pendidikan Agama dan lain-lain, adalah lebih besar. Disamping itu, dalam anggaran rutin pembiajaan dibidang pendidikan — termasuk gadji guru-guru — meliputi djumlah jang tjukup besar.

Pemerintah sama sekali tidak mengabaikan masalah pendidikan anak-anak kita; jang pemetjahannja tidak dapat kita lepaskan begitu sadja dari keseluruhan pembangunan Nasional jang harus kita laksanakan.

Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, pelaksanaan daripada kedadjaksanaan memperbanjak pendidikan tehnik dan kedjuruan, akan benar-benar mulai dilaksanakan.

Disamping pendidikan, bidang kesehatan dan agama djuga mendapatkan perhatian. Dibidang kesehatan diutamakan pada usaha pemberantasan penjakit-penjakit menular, rehabilitasi dan pertambahan djumlah tempat tidur dalam Rumah-rumah Sakit dan penelitian serta pengembangan produksi obat-obatan didalam negeri.

Bidang Agama, Pemerintah akan memberikan bantuan/fasilitas untuk menambah sarana-sarana pelaksanaan agama, sesuai dengan keprtjajaannja masing-masing, seperti kitab-kitab sutji, rehabilitasi tempat peribadatan dan sebagainya.

Sektor lain jang berhubungan dengan kesedjahteraan sosial adalah jang berhubungan dengan masalah penduduk, baik mengenai kepadatan penduduk maupun ketidak-seimbangan penjebaran penduduk.

K. TRANSMIGRASI, KELUARGA BERENTJANA

Dalam hal ini transmigrasi dan keluarga berentjana merupakan bidang-bidang kegiatan jang harus mendapatkan perhatian. Dalam 5 tahun ini, pelaksanaan transmigrasi akan disinchronisasikan dengan pelaksanaan pembangunan projek-projek jang ada, seperti pembuatan daerah persawahan pasang-surut,

eksploitasi kehutanan dan perikanan dan sebagainya, yang direntanakan di daerah-daerah Sumatra, Kalimantan, dan lain-lain ; disamping menggiatkan transmigrasi spontan.

Mengenai perentjanaan keluarga berentjana, maka usaha-usaha akan dititik-beratkan pada pemberian bimbingan dan penerangan kepada masyarakat dan akan dilaksanakan dengan tjara-tjara yang dapat dipertanggung-djawabkan, baik dari segi higiene moral dan norma-norma agama.

Pelaksanaan keluarga berentjana ini bagi kita sebenarnya bukan semata-mata untuk membatasi djumlah kelahiran, karena khawatir akan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan pertambahan produksi, melainkan yang terutama adalah untuk meningkatkan kesedjahteraan keluarga, yang dewasa ini masih rendah itu.

L. PEMBANGUNAN ABRI

Mengenai bidang Hankam, dari gambaran mengenai pembiajan pembangunan tadi, maka dalam tahun pertama Pembangunan Lima Tahun, pembangunan ABRI hanya meliputi 3,2% dari seluruh Anggaran Pembangunan ; dan dalam lima tahun hanya meliputi 2,6% dari seluruh Anggaran Pembangunan. Ini pun bukan berarti, bahwa masalah pertahanan/keamanan kita abaikan, tetapi memang berhubungan dengan terbatasnya kemampuan, prioritas perlu diberikan pada sektor-sektor yang lebih mutlak diperlukan untuk tahapan dewasa ini. Sedangkan bagi Hankam dan ABRI, masih terbatas pada pemeliharaan, penelitian dan pengembangan.

M. PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN DI-DAERAH-DAERAH

Projek-projek pembangunan diberbagai bidang tersebut diatas, kesemuanya berada tersebar diseluruh wilayah Tanah Air ; dengan memperhatikan kondisi serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap Daerah yang berhubungan dengan matjam-matjam projek-projek yang bersangkutan. Hal ini adalah penting, agar disatu pihak pembangunan Indonesia dapat merata dan dilain pihak, agar ada djaminan bahwa pembangunan itu benar-benar berhasil. Pada masa yang lampau, banyak projek-projek yang didirikan sekedar memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat politik, tanpa memperhitungkan setjara wajar faktor ekonomis tehnisnya. Akibatnya adalah bahwa sesudah sesuatu projek berdiri, maka ia tidak dapat menghasilkan apa-apa atau bahkan

mengalami kesulitan-kesulitan dalam merealisasikan proyek tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan, membuang waktu uang dan tenaga ; dan tidak ada gunanya sama sekali.

Oleh karena pangkal bertolak kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemajuan seluruh Indonesia yang merata inilah yang kita tudju. Untuk itu maka dalam pelaksanaan Pembangunan setjara Nasional kita hanya memiliki satu Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Pembangunan Daerah dalam arti pembangunan yang direntjanakan, dibiajai dan dilaksanakan oleh Daerah sendiri, harus merupakan bagian dan diletakkan dalam pola umum daripada Pembangunan Nasional yang satu ini. Dengan demikian, maka diharapkan perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan setjara keseluruhan, baik yang sifatnja Nasional maupun Daerah akan saling melengkapi dan mempertjepat kemajuan yang hendak ditjapai.

Perlu diperhatikan, bahwa proyek-proyek pembangunan semuanya terletak di Daerah-daerah ; tidak satu proyekpun yang setjara fisik dapat dikatakan terletak di Pusat. Dalam hubungan ini, meskipun pertanggungan djawab penjelesaian dari pada proyek-proyek tersebut ada pada Pusat dalam hal ini Departemen-departemen yang bersangkutan, djuga diminta kepada semua aparaturnya dan masyarakat di Daerah-daerah chusnja para Gubernur/Kepala Daerah, untuk ikut bertanggung djawab akan suksesnja setiap proyek pembangunan yang berada di Daerahnja, dalam arti memberikan bantuan serta turut melakukan pengawasan atas pelaksanaan setiap proyek yang terletak di Daerahnja.

N. PEMBANGUNAN DESA

Pemerintah djuga sangat menaruh perhatian kepada pembangunan Desa. Walaupun dengan adanya Pembangunan Lima Tahun ini telah diperkirakan bahwa perekonomian Rakjat yang sebagian besar ada di Desa akan naik, akan tetapi Pemerintah merasa perlu memberikan bantuan setiap desa, jaitu sebesar Rp. 100.000,— untuk tahun pertama Pembangunan yang akan datang, dalam rangka memadjukan dan mengembangkan potensi desa sebagai satuan masyarakat.

Djumlah ini memang tidak besar, akan tetapi dengan bimbingan dan pengarahan penggunaan dana tersebut setjara baik, terutama untuk mengadakan bahan-bahan pembangunan yang tidak dimiliki oleh Desa, maka diharapkan bantuan uang itu

dapat memberikan dorongan pengerahan kemampuan yang dimiliki oleh Desa sehingga dapat menghasilkan proyek-proyek pembangunan Desa yang bermanfaat bagi Rakyat di Desa itu sendiri.

O. REPELITA DIDUKUNG RAKJAT

Itulah tadi pokok-pokok materi dari naskah REPELITA yang telah disiapkan oleh Pemerintah. Uraian setjara terperinci dan lebih djelas akan dapat diketahui dari ketiga buku tersebut.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini sekarang telah selesai disusun oleh Pemerintah. Baik yang mengenai dasar-dasar, arah serta sasaran-sarannya, sepenuhnya didasarkan atas haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPRS sendiri ; khususnya Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini sesungguhnya diharapkan dapat ditetapkan oleh MPRS dalam Sidang Umum ke-V yang lalu. Akan tetapi, dengan Ketetapan MPRS No. XLI, MPRS telah memberikan tugas kepada Kabinet Pembangunan untuk menyusun dan melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu. Sebagai pelaksanaan dari pada ketetapan tersebut, maka Pemerintah telah berhasil menyusun Rentjana Pembangunan Lima Tahun ; tanpa mengurangi kemungkinan perubahan atau penjesuaian-penjesuaian yang perlu dikemudian hari, maka Naskah Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, untuk resminja telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, yang selandjutnja akan digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan penjusunan Anggaran Belandja Negara setiap tahunnja.

Dengan demikian, hal ini sama sekali tidak berarti bahwa Rakyat, khususnya lembaga-lebaga negara yang merupakan wakil-wakil Rakyat tidak ikut serta dalam penjusunan dan pelaksanaan ini — sepanjang mengenai sektor Pemerintah — dituangkan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, yang disusun bersama-sama oleh DPR-GR dan Pemerintah. Disamping itu, segala kebidjaksanaan yang penting untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan itu akan dituangkan dalam berbagai Undang-undang yang dianggap perlu.

Garis-garis besar mengenai arah dan isi Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, telah dilaporkan oleh Presiden kepada DPR-GR dan djuga langsung kepada Rakjat, masing-masing dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1967 dan 1968 jang lalu ; demikian djuga pada berbagai kesempatan jang lain. Dalam laporan Presiden R.I. pada achir tahun 1968 kepada seluruh Rakjat Indonesia, Presiden telah menjampaikan terima kasih jang sebesar-besarnja kepada seluruh Rakjat jang telah memberikan kepertjajaan dan mendukung garis-garis besar Rentjana Pembangunan itu. Dengan demikian, maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang sekarang telah disiapkan oleh Pemerintah itu merupakan perintjian dari pada pola umum pembangunan jang telah didukung oleh seluruh Rakjat.

B A B III

SISTIMATIK/DAFTAR ISI BUKU RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN PERTAMA 1969 — 1973

BUKU PERTAMA U M U M

- Bab I. Tujuan, Sasaran dan Kebidjaksanaan
- Bab II. Sumber-sumber Pembiajaan
- Bab III. Neratja Pembajaran Internasional
- Bab IV. Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
- Bab V. Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan

BUKU KEDUA RENTJANA BIDANG-BIDANG

- Bab VI. Pertanian dan Irigasi
- Bab VII. Industri, Pertambangan dan Tenaga listrik
- Bab VIII. Perhubungan dan Pariwisata
- Bab IX. A g a m a
- Bab X. Pendidikan dan Tenaga Kerdja
- Bab XI. Kesehatan dan Keluarga Berentjana
- Bab XII. Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial
- Bab XIII. Tertib Hukum dan Penerangan
- Bab XIV. Transmigrasi dan Koperasi
- Bab XV. Pertahanan dan Keamanan Nasional
- Bab XVI. Penelitian dan Pengembangan Statistik

BUKU KETIGA PERINTJIAN MENURUT DAERAH

1. Daerah Atjeh
2. Daerah Sumatera Utara
3. Daerah Sumatera Barat
4. Daerah Riau
5. Daerah Djambi
6. Daerah Sumatera Selatan
7. Daerah Bengkulu
8. Daerah Lampung
9. Daerah Djawa Barat

10. Daerah DCI Djakarta Raya
11. Daerah Djawa Tengah
12. Daerah Jogjakarta
13. Daerah Djawa Timur
14. Daerah Kalimantan Barat
15. Daerah Kalimantan Tengah
16. Daerah Kalimantan Selatan
17. Daerah Kalimantan Timur
18. Daerah Sulawesi Utara
19. Daerah Sulawesi Tengah
20. Daerah Sulawesi Selatan
21. Daerah Sulawesi Tenggara
22. Daerah Bali
23. Daerah Nusa Tenggara Barat
24. Daerah Nusa Tenggara Timur
25. Daerah Maluku
26. Daerah Irian Barat

Ichtisar : Pedoman Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pertama berdasarkan Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968 terdiri dari :

- a. 3 Buku : I, Buku dan Buku III
 - b. Buku I terdiri dari 5 Bab
 - c. Buku II terdiri dari 11 Bab
 - d. Buku III terdiri dari 26 Daerah Pembangunan.
-

LAMPIRAN I :

PENDJELASAN PRESIDEN R.I. KEPADA PARA GUBERNUR/ KEPALA DAERAH SELURUH INDONESIA DALAM RANGKA PENJUSUNAN REPELITA PADA 2 DESEMBER 1968.

Saudara-saudara para Gubernur/Kepala Daerah ;

Pada saat ini saja merasa perlu mengumpulkan Saudara-saudara Gubernur sekalian, khusus untuk membulatkan pendapat kita bersama mengenai Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/1970 — 1973/1974).

Rangkaian pertemuan jang kita selenggarakan dalam waktu seminggu nanti, mempunjai tudjuan-tudjuan pokok sebagai berikut :

- pertama, untuk digunakan memberikan pendjelasan-pendjelasan dan petundjuk-petundjuk umum mengenai perentjanaan Pembangunan Lima Tahun, dan pelaksanaannya nanti ;
- kedua, dalam hubungan diatas, diharapkan para Gubernur memberikan bahan-bahan dan pertimbangan-pertimbangan mengenai rantjangan Rentjana Pembangunan jang telah disusun oleh BAPPENAS, guna penjemputan, apabila masih diperlukan agar lebih memperlantjar pelaksanaannya ;
- ketiga, pendjelasan dan penegasan mengenai peranan Daerah dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan itu, sekaligus dalam hubungannya dengan masalah-masalah Pembangunan Daerah.

Dalam kesempatan ini, saja tidak akan mengemukakan hal-hal materi atau bidang-bidang projek jang tertjakup dalam buku REPELITA jang telah disiapkan itu, oleh karena masalah-masalah tersebut akan dapat diadakan pembahasan bersama dengan para Menteri dan BAPPENAS nanti. Demikian pula mengenai Pola-pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun, saja anggap telah Saudara-saudara peladjar sedalam-dalamnya dari pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus jang lalu, jang sekaligus merupakan laporan dan pendjelasan saja kepada Rakjat mengenai Rentjana Pembangunan itu.

Saja hanja ingin memberikan petundjuk-petundjuk pokok kebidjaksanaan Pemerintah dalam penjusunan REPELITA itu serta masalah-masalah jang harus diperhatikan, chususnja oleh para Gubernur/Kepala Daerah dan pelaksanaan pada umumnja dalam mensukseskan pelaksanaannja nanti.

Saudara-saudara sekalian ;

Sesuai dengan penegasan jang saya berikan, maka dewasa ini BAPPENAS telah menjiapkan Rantjangan Rentjana Pembangunan Lima Tahun dengan berpegang pada pola-pola dasar jang telah digariskan itu. Rantjangan tersebut merupakan hasil bersama antara BAPPENAS dengan semua Departemen dan Lembaga-lembaga. Walaupun demikian, saya masih menganggap perlu agar Rantjangan tadi sekali lagi dibahas oleh para Menteri, dan djuga oleh Saudara-saudara sekalian para Gubernur/Kepala Daerah. Dengan tjara demikian, diharapkan tidak sadja kita akan mempunyai satu Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang mempunyai ruang lingkup Nasional jang bulat, sempurna dan realistis, tetapi djuga kita sekalian para pimpinan Pemerintah ditingkat Pusat maupun Daerah keseluruhannja telah memiliki kebulatan pendapat dan akan bekerdja keras untuk mensukseskannja.

Berdasarkan hasil-hasil pembahasan tadi, maka Pemerintah akan mengambil keputusan terachir dalam Sidang Kabinet jang akan datang, sehingga akan merupakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang sjah dan resmi dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPRS.

Rantjangan Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu telah disusun oleh BAPPENAS berdasarkan data-data jang tersedia, baik jang ada di Pusat maupun jang diperoleh dari Daerah, dengan sendirinja setelah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan-kemampuan jang sewadjaranja, baik ditinjau dalam ruang lingkup Nasional, maupun dengan menje-suaikan sedjauh mungkin dengan kondisi serta inspirasi Daerah.

Saja perlu menekankan, bahwa dalam menjusun Rentjana Pembangunan ini, maka orientasi pelaksanaan merupakan salah satu pertimbangan jang utama. Artinja, setiap projek dalam rentjana tadi hendaknja akan benar-benar dapat dilaksanakan setjara fisik dalam waktu jang direntjanakan.

Oleh karena itulah, semua Departemen dan Saudara-saudara para Gubernur/Kepala Daerah saja minta untuk ikut serta meneliti Rantjangan Rentjana Pembangunan tadi ; sebab, Depar-

temen-Departemen dan para Gubernur-lah jang nanti akan melaksanakannja proyek-proyek pembangunan itu sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.

Saja merasa perlu menekankan setjara khusus tata-kerdja perentjanaan ini, oleh karena Rentjana Pembangunan jang baik adalah rentjana jang diserasikan penjusunnja dari „atas” dan dari „bawah”. Dengan ikut-sertanja unit-unit pelaksana dalam penjusunan rentjana itu ; akan berarti timbulnja tanggung-djawab bersama dalam pelaksanaannja nanti. Pelaksanaan pembangunan itu, bukan sadja setjara fungsionil mendjadi tanggung-djawab Departemen-departemen, para Gubernur dan semua pedjabat-pedjabat pemerintah ; melainkan djuga merupakan tanggung-djawab moril kita — sebagai pemimpin-pemimpin — kepada masjarakat.

Saudara-saudara sekalian ;

Penjusunan rentjana dan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun ini merupakan pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan, seperti jang telah ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968.

Dalam menjusun Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu, Pemerintah berpegang teguh kepada Haluan Negara jang telah digariskan oleh Sidang Umum ke-IV, Sidang Istimewa dan Sidang Umum ke-V MPRS, seperti Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan lain-lain.

Pada dasarnja dalam menjusun Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, kebidjaksanaan dan sasaran-sasarannja, ditentukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Untuk menaikkan tara kehidupan Rakjat banjak, dan hal ini berarti menaikkan pendapatan per-capita ;
2. Memperhatikan kemampuan-kemampuan jang kita miliki dewasa ini dan dengan tetap memegang teguh perspektif tudjuan djangka pandjang ;
3. Meletakkan dasar-dasar jang kuat bagi Pembangunan Lima Tahun tahap jang berikutnja.

Oleh karena itu, seperti jang telah berulang kali saja djelaskan, rentjana Pembangunan itu disusun dengan pendekatan jang realistis dan pragmatis.

Saja perlu menekankan, bahwa keadaan perekonomian kita dewasa ini dapat saja kategori-kan sebagai „perekonomian serba

terbatas". Kenyataan ini memang pahit, akan tetapi harus kita sadari sedalam-dalamnja. Perlu kita sadari, bahwa dalam keadaan perekonomian demikian tadi, maka kita tidak banjak memiliki alternatif-alternatif. Oleh karena itu, saja ingin menekankan agar kita dapat menahan diri ; artinja kita harus dapat dengan bidjaksana dan tepat memadukan antara „harapan" dan „kenyataan". Harapan kita, — terutama harapan masyarakat dewasa ini — adalah sangat besar : akan tetapi dilain pihak, kemampuan yang kita miliki adalah sangat terbatas djika dibandingkan dengan keinginan dan harapan-harapan itu.

Hal-hal yang saja sebutkan tadi merupakan pedoman, yang didalam pelaksanaannja tidak perlu kaku. Sifat yang „luwes" (flexible) ini merupakan salah satu tjiri daripada setiap Rentjana Pembangunan Nasional, yang sedang membangun seperti kita ini. Sifat ke-luwes-an itu disebabkan oleh karena kita tidak mungkin memperhitungkan semua faktor yang ada ; disamping itu kita djuga tidak mungkin dapat meramalkan berbagai perkembangan dimasa depan yang berada diluar djangkauan kemampuan manusia untuk memastikannja. Walaupun demikian, sedjauh mungkin kita harus berusaha sekuat tenaga agar Pembangunan itu dapat berdjalan sesuai dengan rentjana. Faktor lain, yang memang memungkinkan adanya ke-luwes-an ialah, oleh karena setiap Daerah memiliki sifat-sifat khusus dan kemampuan yang khusus pula.

Saudara-saudara sekalian ;

Rentjana Pembangunan Lima Tahun yang akan datang, merupakan suatu tahap permulaan daripada serangkaian rentjana Pembangunan Lima Tahun selandjutnja. Yang harus kita susun dan kita laksanakan setjara kontinu. Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, merupakan peletakan landasan-landasan yang kuat bagi pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap berikutnja nanti, dan demikian selandjutnja. Melalui serangkaian Rentjana Pembangunan yang masing-masing dengan djangka waktu lima tahun itulah, kita berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, yang merupakan isi daripada tjita-tjita kemerdekaan kita.

Oleh karena itu, disamping kita harus melihat kenyataan-kenyataan dan kemampuan yang kita miliki dewasa ini, maka perhatian kita sama sekali tidak boleh terlepas dari perspektif djangka pandjang. Dengan sendirinja, landasan Pantja Sila selalu merupakan prinsip yang harus kita pegang teguh. Dalam

hubungan ini, maka demokrasi ekonomi — seperti yang tjirinja telah ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII — tetap harus merupakan pembimbing utama daripada Rentjana Pembangunan ini. Prinsip lain yang djuga harus kita pegang teguh adalah prinsip Negara Kesatuan ; hal ini berarti bahwa setiap aspek daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan djuga pelaksanaannja, harus senantiasa merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkokoh kesatuan Indonesia ; baik dalam arti kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kebudayaan maupun kesatuan pertahanan-keamanan.

Bertolak dari prinsip diatas, maka kita hanya mempunyai satu Rentjana Pembangunan Nasional ; yang didalamnya memuat landasan-landasan, tudjuan, sasaran-sasaran, proyek-proyek dan prioritas-prioritas kegiatan Nasional kita.

Dengan menekankan adanya satu Rentjana Pembangunan Nasional tadi, saya maksudkan agar setiap kegiatan dan inisiatif Daerah harus diletakkan dalam rangka pola umum Rentjana Pembangunan Nasional tadi. Setjara konkrit saja memberi petunjuk, agar rentjana kerdja dan kegiatan-kegiatan Daerah dipilih bidang-bidang yang menundjang Rentjana Pembangunan Nasional.

Dalam rangkaian pengertian ini, maka Pembangunan Daerah adalah semua kegiatan pembangunan yang ada/dilakukan di Daerah, yang unsur-unsurnja terdiri dari :

- (1) kegiatan-kegiatan/proyek-proyek Nasional yang ada di daerah itu ;
- (2) kegiatan-kegiatan/proyek-proyek Pembangunan Daerah sendiri, diluar yang sudah direntjanakan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hubungan ini, maka saya perlu menekankan, bahwa sebenarnya tidak ada satu proyek-pun yang setjara fisik „terletak” di Pusat ; oleh karena semua proyek-proyek itu setjara fisik djustru tersebar dan terletak di Daerah-daerah. Apa yang biasanya dikenal sebagai „proyek Pusat” atau „proyek Daerah” hanya berbeda dalam hal pertanggungan djawab penjelenggara teknis serta pembiajaannja saja. Proyek yang dikenal sebagai „proyek Pusat”, sebenarnya adalah proyek-proyek pembangunan yang mempunyai nilai strategis dalam ruang lingkup Nasional. Sesuatu proyek, dianggap mempunyai nilai Nasional, apabila dengan adanya proyek tadi potensi-potensi ekonomi Nasional kita dapat

dikembangkan diseluruh Daerah dalam rangkaian kesatuan Indonesia. Didalam keadaan dimana kemampuan pembiajaan dan peralatan yang kita miliki masih serba terbatas seperti sekarang ini, penentuan prioritas-prioritas dan proyek-proyek Nasional itu sangat penting. Tanpa penentuan-penentuan prioritas yang bertolak dari kepentingan Nasional tadi, maka kemampuan-kemampuan (terbatas) yang kita miliki tidak mungkin dapat diarahkan kepada sektorsektor yang strategis. Oleh karena itu, proyek-proyek yang mempunyai nilai Nasional ini semuanya harus disusun djalin-mendjalin, saling-mendorong, saling menundjang, sehingga setjara keseluruhan merupakan proyek yang konsisten.

Djustru oleh karena pro-proyek tadi dimaksudkan untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi Nasional kita, maka penentuan lokasinya djuga harus diperhitungkan sedemikian, sehingga sesuai dengan kemungkinan kemampuan dan kondisi-kondisi masing-masing Daerah. Dengan dasar-dasar pikiran tadi, maka kita dapat memperhitungkan, bahwa sesuatu proyek Nasional benar-benar dapat terwujud, dengan biaya yang serendah mungkin dan mendapatkan manfaat yang seluas mungkin.

Mengenai „Proyek-proyek Nasional” yang berada di Daerah maka tanggung djawab pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan Departemen operasional yang bersangkutan, sedangkan pembiajaannya djuga menjadi tanggung djawab Pemerintah Pusat. Dalam hubungan ini, maka Gubernur/Kepala Daerah wajib mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek-proyek tadi dan djuga wajib memberikan bantuan kelantjarannya.

Tadi telah saja djelaskan, bahwa walaupun kita hanya memiliki satu Rentjana Pembangunan, inisiatif Daerah tetap diperlukan bahkan mutlak dan harus dikembangkan setjara optimal. Inisiatif Daerah ini, sekaligus harus dihubungkan dengan pelaksanaan yang sehat daripada otonomi Daerah yang riil dan luas. Ini berarti, bahwa pelaksanaan „Proyek-proyek Daerah” yang tidak atau belum masuk dalam REPELITA sepenuhnya menjadi tanggung djawab Daerah termasuk pembiajaannya.

Satu bidang dalam rangka pembangunan Daerah yang sangat mendapatkan perhatian Pemerintah adalah Pembangunan Desa, dimana Pemerintah menjediakan bantuan/subsidi Rp. 100.000,—. Oleh karena itu diharapkan agar supaya Pemerintah Daerah dapat mengusahakan memanfaatkan dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan desa, bahkan mendorong mengembangkan

nja. Dalam mengembangkan inisiatif Daerah tersebut, saja memberikan petundjuk, bahwa kegiatan dan usaha-usaha Daerah tadi, disamping harus didasarkan atas sumber-sumber kemampuan Daerah jang riil dan sah, djuga harus diletakkan dalam keseluruhan pola umum Pembangunan Nasional. Artinja, kegiatan dan usaha-usaha Daerah tadi harus merupakan komponen jang komplementer terhadap Rentjana Pembangunan Nasional.

Dengan adanja pola rentjana dan pola kegiatan dalam ruang lingkup Nasional dan ruang lingkup Daerah seperti jang saja sebutkan tadi, maka usaha-usaha dan kemampuan-kemampuan Daerah akan dapat digerakkan setjara efektif dan saling menunjang dengan projek-projek Nasional.

Saudara-saudara sekalian ;

Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu, akan kita mulai pada 1 April tahun depan, jaitu bersamaan dengan Tahun Anggaran kita jang baru. Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun setiap tahunnja akan tertjermin dalam APBN dari tahun jang bersangkutan. Ini berarti bahwa pelaksanaan dari REPELITA itu telah dilakukan melalui prosedur konstitusionil, tetapi djuga dengan demikian Rakjat akan dapat mengikuti dan mengawasi setjara aktif progres serta hasil-hasil jang ditjapai dalam pelaksanaan REPELITA itu tahun demi tahun.

Sidang Umum ke-IV MPRS telah menugaskan kepada Kabinet Ampera untuk mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, jaitu landasan-landasan jang harus dapat kita letakkan untuk melaksanakan Pembangunan Lima Tahun jang akan datang. Tahun 1968 ini merupakan tahun terahir pelaksanaan tugas stabilisasi tersebut. Oleh karena itu marilah sisa waktu jang tinggal beberapa bulan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk memelihara, mengkonsolidasikan dan meningkatkan segala hasil jang dapat kita tjapai hingga dewasa ini.

Dengan penilaian jang sangat berhati-hati, saja dapat mengatakan bahwa keadaan perekonomian kita dewasa ini telah menunjukkan kemantapan disektor-sektor jang strategis. Walaupun demikian, kita masih harus sangat berhati-hati dengan perkembangan keadaan pada akhir tahun ini sampai dengan kwartal pertama tahun depan. Apabila tidak ada kegontjangan-kegontjangan keadaan jang diluar perhitungan, maka Insja Allah, pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun itu telah mem-

punjai landasan-landasan jang tjukup kuat, ialah keadaan stabilitas ekonomi dan politik jang relatif mantap serta suatu Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang bulat dan realistik.

Saja menjadari sepenuhnya, bahwa apa jang dapat kita tjapai dewasa ini belum memadai apa jang diinginkan oleh Rakjat banjak, akan tetapi apabila keadaan dewasa ini dinilai dalam rangkaian proses perkembangan, lebih-lebih dihubungkan dengan warisan kerusakan ekonomi dari masa lampau, maka kita dapat melihat bahwa kemadjuan-kemadjuan besar telah dapat kita tjapai. Akan tetapi djauh lebih banjak dari kemadjuannya dapat kita tjapai itu, kita memang masih harus lebih banjak bekerdja karena masih banjak tugas jang harus kita selesaikan.

Saudara-saudara sekalian ;

Sesuai dengan garis-garis besar Haluan Negara jang ditetapkan oleh MPRS tadi, — chusnja mengenai kebidjaksanaan pembangunan —, demikian djuga prinsip-prinsip umum Pembangunan Nasional, maka pembangunan itu hanja akan dapat berdjalan dengan sebaik-baiknya apabila seluruh masjarakat ikut mendukung dan melaksanakannya dalam bidang tugas masing-masing. Dalam hubungan ini, maka disamping berbagai pembangunan fisik jang dilaksanakan oleh Pemerintah ; maka Pemerintah — beserta semua aparaturnja — mutlak mempunjai kewadajiban untuk mentjiptakan suasana umum jang dapat merangsang kegairahan bekerdja dari masjarakat diatas landasan-landasan jang sehat, tetapi mengusahakan terpeliharannya stabilitas politik. Untuk ini, maka program Pantja Tertib benar-benar harus ditingkatkan.

Menurut djadwal waktu jang telah saja rentjanakan, pada achir tahun ini Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu harus telah merupakan keputusan jang bulat dan resmi dari Pemerintah. Dengan demikian, maka sedjak 1 Djanuari tahun depan Rentjana Pembangunan itu harus telah disebar-luaskan kepada seluruh masjarakat, agar dengan demikian masjarakat dapat memahami seluas-luasnja rentjana kerdja Nasional kita jang besar itu.

Saudara-saudara sekalian ;

Rentjana Pembangunan Lima Tahun barulah merupakan satu langkah permulaan, bahkan baru merupakan langkah persiapan dari suatu pekerdjaan besar.

Segi-segi pelaksanaan merupakan komponen jang penting daripada rentjana tersebut. Dalam hubungan ini, maka saja minta kepada semua Gubernur/Kepala Daerah untuk menaruh perhatian jang sebesar-besarnja kepada aparatur pelaksanaan ini di Daerah masing-masing. Unit-unit perentjana dan unit-unit pelaksana dalam semua eselon harus benar-benar dibimbing, diawasi dan apabila perlu dikoreksi setjara wadjar. Saja ingin menegaskan lagi bahwa dalam bidang Pemerintahan, Gubernur/Kepala Daerah adalah Penguasa Tunggal di Daerahnja seperti jang ditegaskan dalam Instruksi Presiden No. 05 Tahun 1967.

Dalam hubungan ini, saja minta agar para Gubernur benar-benar dapat mendjadi administrator dalam arti luas ; jaitu administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator masjarakat di Daerahnja. Tugas itu djelas tidak ringan ; akan tetapi kita memang tidak mempunyai pilihan lain. Kita semuanja sudah mengikat djandji untuk memenangkan perdjoangan Orde-Baru ; hal ini berarti bahwa kita harus meneruskan perdjoangan untuk mewujudkan Orde Pembangunan ; Dengan melaksanakan pembangunan jang bertahap dan berentjana jang harus segera kita mulai, dalam tahun 1969 ini djuga, tidak dapat ditunda-tunda lagi, karena seluruh Rakjat telah menanti-nanti dan telah menjiapkan dirinja untuk melakukan pembangunan ; hanja menunggu bimbingan, adjakan dan pengaruhnja jang paling tepat dan benar-benar dirasakan ke-manfaatnja bagi mereka.

Marilah kita semuanja bekerdja keras, memberikan andilnja masing-masing untuk mensukseskan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu.

Sambil bekerdja keras, marilah kita senantiasa memandjatkan doa kehadiran Tuhan Jang Maha Esa, semoga kita semuanja senantiasa diberi-Nja bimbingan, kebidaksanaan, kekuatan lahir dan batin, dalam pengabdian kita bersama kepada Rakjat, Bangsa dan Negara.

Demikianlah pendjelasan, petundjuk-petundjuk dan harapan saja ; hendaknja mendapat perhatian Saudara-saudara sekalian.

Sekian dan terima kasih.

LAMPIRAN II :

POLA DASAR PROGRAM UMUM NASIONAL.

I. PENGERTIAN :

Program Umum Nasional adalah usaha dan kegiatan Bangsa untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi, tjita-tjita dan tudjuan Bangsa, jang meliputi Tudjuan, Landasan, Faktor-faktor Determinan, Modal Dasar, Azas, Arah, Usaha-usaha Pembangunan dan Realisasi dalam mentjapai tjita-tjitanja, sebagai landasan dan pegangan pokok dalam menjusun dan pelaksanaan Pola Dasar Rentjana Pembangunan 5 Tahun.

II. TUDJUAN NASIONAL :

Tudjuan Nasional Bangsa ditegaskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, jang pada hakekatnja adalah : „Mewujudkan satu masjarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan PANTJA-SILA didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan Bangsa jang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia jang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

III. L A N D A S A N :

Dalam hendak mentjapai Tudjuan Nasional, Bangsa Indonesia berpangkal tolak kepada landasan Idiil-Pantja Sila dan landasan Konstitusionil Undang-undang Dasar 1945.

IV. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN :

Dalam usaha mentjapai tudjuan Nasional dengan landasan-landasan diatas, maka Bangsa Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor determinan sebagai berikut :

1. Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi.
2. Faktor klimatologi.
3. Faktor flora dan fauna.
4. Faktor demografi.
5. Faktor kemungkinan pengembangan.

V. MODAL DASAR :

Modal Dasar Nasional berupa kekayaan dan kemampuan Bangsa untuk mentjapai tudjuan Nasional Bangsa, baik

jang bersifat materiil maupun spirituil, baik riil maupun jang potensiil, baik jang subjektif maupun jang objektif, jaitu :

- a. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa adalah modal dasar Bangsa dalam hendak menentukan nasib, peri-kehidupan dan hari depan Bangsa.
- b. Kedudukan Geografis Indonesia sepanjang garis katu-listiwa dan posisinja sebagai wilayah penghubung, serta tempat posisi silang antar dua benua dan dua samudra raya, dengan iklim tropika dan tjuatja musim-musimnja, memberikan kondisi alamijah serta kedudukan dan peranan strategis jang sangat tinggi nilainja.
- c. Sumber-sumber Kekajaan Alam jang berlimpah-limpah didarat dan dilaut, memberikan kemungkinan luas bagi pengembangan peri-kehidupan Bangsa disegala bidang.
- d. Djumlah Penduduk jang sangat besar merupakan satu potensi tenaga kerdja jang besar dan kuat sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang.
- e. Modal Rohanijah dan Mental, jaitu kepertjajaan dan ke-taqwaan kepada Tuhan Jang Maha Esa merupakan tenaga penggerak jang tak ternilai harganja bagi pengisian aspirasi-aspirasi Bangsa. Djuga kepertjajaan dan kejakinan Bangsa atas kebenaran falsafah Pantja-Sila merupakan modal sikap mental jang dapat membawa Bangsa menudju tjita-tjitanja.
- f. Modal Budaja, jaitu budaja Bangsa Indonesia jang telah berkembang sepanjang sedjarah Bangsa merupakan modal dasar Nasional bagi pembangunan dan pengembangan potensi Bangsa disegala bidang.
- g. Potensi Efektif Bangsa, jaitu segala sesuatu jang bersifat potensif dan produktif jang telah ditjapai oleh Bangsa sepanjang sedjarahnja merupakan modal dasar bagi pentjapaian tudjuan Bangsa.

VI. A R A H :

Arah dalam mentjapai tudjuan Nasional adalah :

- a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, (dalam arti luas) dalam artii :
 1. Bahwa Kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekajaannja harus dapat merupakan satu ke-

satuan wilajah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh Bangsa, serta mendjadi modal dan milik bersama Bangsa.

2. Bahwa Bangsa Indonesia jang terdiri dari berbagai matjam suku dan berbitjara dalam berbagai matjam bahasa daerah, memeluk dan mejakini berbagai matjam agama dan kepertjajaan, harus merupakan satu kesatuan Bangsa jang bulat dalam arti jang seluas-luasnja.
 3. Bahwa setjara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, merasa senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tah Air, serta mempunjai satu tekad dalam hendak mentjapai tjita-tjita Bangsa.
 4. Bahwa Pantja-Sila adalah satu-satunja Ideologi Bangsa dan Negara, jang melandai, membimbing dan mengarahkan Bangsa menudju tudjuannja.
 5. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanja ada satu Hukum Nasional jang mengabdikan kepada Kepentingan Nasional.
 6. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan ; antjaman dan gangguan terhadap satu pulau atau satu daerah hakekatnja merupakan antjaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunjai hak dan kewadajiban jang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.
- b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Kulturil, dalam arti :
1. Bahwa masjarakat Indonesia adalah satu, peri-kehidupan Bangsa harus merupakan satu kehidupan jang homogeen dengan adanja tingkat kemadjuan masjarakat jang sama, merata dan seimbang serta adanja Keselarasan Kehidupan jang sesuai dengan kemadjuan Bangsa.
 2. Bahwa budaya Indonesia adalah satu ; tjorak ragam budaya jang ada menggambarkan kekajaan budaya Bangsa jang mendjadi modal dan landasan pengembangan budaya Bangsa seluruhnja ; jang hasil-hasil-dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa.

- c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :
 1. Bahwa kekayaan wilayah Bangsa baik potensiil maupun efektif adanja modal dan milik bersama Bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata diseluruh wilayah tanah air.
 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus sama diseluruh Daerah, tanpa meninggalkan tjiri-tjiri chas jang dimiliki oleh Daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominja.

VII. A Z A S - A Z A S :

Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam hendak mempunjai Tudjuan Nasional Bangsa adalah :

- a. Azas Demokrasi ; jang dimaksudkan dengan Azas Demokrasi disini adalah Demokrasi berdasarkan Pantja-Sila jang meliputi baik bidang Politik, Sosial maupun Ekonomi, serta jang berusaha menjelesaikan masalah-masalah Nasional berdasarkan azas musjawarah mu-fakat.
- b. Azas Peri-kehidupan dalam Keseimbangan ; dalam arti selalu adanja keseimbangan antar kepentingan-kepentingan ; jaitu antar kepentingan keduniaan dan achirat, antar kepentingan materiil dan spirituil, antar kepentingan djiwa dan fikiran, antar kepentingan individu masjarakat, antar kepentingan Nasional dan Internasional, antar kepentingan peri-hidup darat, peri-hidup lautan dan peri-hidup udara.
- c. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan ; ialah bahwa usaha mentjapai tjita-tjita dan aspirasi-aspirasi Bangsa merupakan usaha bersama Bangsa dan seluruh Rakjat dilakukan setjara gotong-rojong dan didjiwai oleh semangat kekeluargaan.
- d. Azas Adil dan Merata ; berarti bahwa hasil-hasil materiil dan spirituil jang ditjapai oleh Bangsa harus dapat merata dinikmati oleh seluruh Bangsa, tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil Bangsa itu, sesuai nilai darma-bakti, sumbangan tenaga fikiran jang diberikan kepada Bangsa dan Negara.
- e. Azas Manfaat ; dalam arti bahwa segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnja bagi

masjarakat, bagi kesedjahteraan Rakjat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

VIII. USAHA PEMBANGUNAN :

Pentjapaian tudjuan Nasional merupakan tanggung-djawab seluruh Bangsa dan hanja dapat terlaksana lewat satu rangkaian usaha pembangunan Nasional disegala bidang, setjara berentjana dan bertahap ; dengan penetapan sasaran-sasaran bagi satu babakan pembangunan tertentu, tanpa meninggalkan azas-azas idiil. Usaha-usaha pembangunan dilakukan setjara realistis dan pragmatis dalam arti penjesuaian sasaran dengan kemampuan dan kemungkinan jang ada pada Bangsa dan Negara.

IX. REALISASI :

Reailsasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spirituil Bangsa hanja dapat terlaksana dengan mewudjudkan aspek adil dan aspek makmur daripada tudjuan Nasional.

- a. Perwudjudan Aspek Adil meliputi usaha-usaha pembangunan dalam bidang-bidang hukum dan tertib hukum ; pembangunan-pembangunan dalam bidang rohanijah, mental dan spirituil ; pembangunan administrasi dan aparatur negara jang memenuhi tuntutan masjarakat ; pembangunan daja dan hasil guna daripada masjarakat dan negara ; penjediaan lapangan kerdja dan kesempatan reaksi ; pembangunan keamanan, ketenteraman dan suasana tertib dan dinamis.
- b. Perwudjudan Aspek Makmur dapat ditapai dengan usaha-usaha pembangunan prasarana dan perhubungan, pembangunan agraria luas antara lain pertanian, perkebunan, agraria luas antara lain pertanian, pekerbunan, kehewanan, peternakan, perikanan darat dan kehutanan ; pembangunan dan pengolahan hasil tambang ; pembangunan dan pengembangan exploitasi enersi dan tenaga ; pembangunan dan pengolahan potensi maritim ; pembangunan industri dan keradjinan ; pengembangan ilmu pengetahuan, research dan teknologi ; pembangunan masjarakat desa, tempat tinggal dan perumahan.

Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Ummat Indonesia, sesuai dengan nilai sumbangan fikiran, tenaga dan usahanja bagi Negara dan Bangsa adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan materiil berupa pangan, sandang, tempat tinggal dan perumahan, serta fasilitas-fasilitas hidup lainnja seperti alat kerdja, rekreasi dan angkutan serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnja.
- b. Pemenuhan kebutuhan hidup rohaniyah dan spirituul jang berupa mendapatkan tuntutan dalam penghidupan Agama dan dapat bebas melakukan ibadah sesuai dengan Agama dan kepertjajaannja, dapat menikmati pendidikan dan mengerdjar ilmu pengetahuan sesuai dengan bakatnja, dapat menikmati hasil-hasil budaja ; djaminan pemeliharaan kesehatan ; dapat bekerdja dan dapat menikmati kesempatan rekreasi ; dapat menikmati ketenangan lahir dan batin ; ketenteraman dan keamanan, serta ketertiban hukum ; dapat menikmati suasana kemerdekaan ; kebenaran dan keadilan ; serta menikmati peri-kehidupan Nasional jang sedjahtera, bahagia dan serasi.

X. BABAKAN PEMBANGUNAN :

Pelaksanaan Pembangunan Nasional dilakukan babakan demi babakan dengan mengambil djangka waktu 5 tahun untuk tiap babakan. Dalam tiap-tiap babakan ditentukan :

- a. Sasaran-sasaran pokok jang harus ditjapai ;
 - b. Bidang-bidang dan sektor-sektor pembangunan jang harus dilakukan ;
 - c. Pokok-pokok kebidjaksanaan pembiajaan pembangunan baik sektor swasta maupun Pemerintah ;
 - d. Pokok-pokok kebidjaksanaan dibidang-bidang lain jang mendukung dan akan memperlantjar pelaksanaan pembangunan.
-

LAMPIRAN III :

POLA DASAR RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

PENDAHULUAN :

1. Kekayaan alam keadaan iklim dan keadaan geografi yang menguntungkan bersama dengan tenaga kerja yang banyak menyebabkan bahwa Indonesia mempunyai potensi pembangunan yang besar. Dimasa pendudukan potensi ini hanya dikembangkan setjara terbatas dibidang pertanian, khususnya perkebunan, yang hasilnya untuk bagian terbesar diolah diluar negeri. Hal ini mengakibatkan bahwa struktur ekonomi Indonesia adalah berat-sebelah agraris yang berorientasi pada ekspor.
2. Pada permulaan masa kemerdekaan, Bangsa Indonesia belum sempat memikirkan pembangunan ekonomi, sedangkan pada masa Orde-Lama ekonomi diabdikan kepada politik dan dibidang ekonomi prinsip-prinsip ekonomi yang rasional diabdikan. Akibat langsung dari hal ini adalah kemerosotan ekonomi yang dibarengi dengan proses hyperinflasi yang semakin gawat. Ekspor merosot tajam, produksi dalam negeri turun, pengangguran meningkat, prasarana-ekonomi terbengkalai, dan tingkat pertumbuhan ekonomi ketinggalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Lambangnya tingkat pertumbuhan ekonomi mengakibatkan bahwa rupa-rupa fasilitas pada peningkatan kehidupan sosial menjadi terbelakang. Fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, ibadah dan lain-lain tidak mampu mengikuti kebutuhan. Perkembangan pendidikan tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi, sehingga mengakibatkan pengangguran. Pertambahan penduduk tertumpuk pada wilayah Djawa, sedangkan luar Djawa masih menderita kekurangan penduduk.
4. Lahirnya Orde-Baru memungkinkan pendobrakan salah urus dalam segala bidang terutama dalam bidang ekonomi yang diwariskan oleh Orde-Lama. Hakekat dari landasan idil kebidaksanaan baru ini adalah pembinaan sistem ekonomi yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pantja-Sila.

- d. Pengaruh pengembangan sektor pertanian cukup besar pada peningkatan pendapatan nasional, mengingat bahwa sektor ini menjumbang 52% pada pendapatan nasional dan memberi kesempatan kerja kepada 72% dari jumlah tenaga kerja ;
 - e. Peningkatan produksi dan pendapatan di sektor pertanian dapat pula merangsang pasaran bagi produksi sektor industri, sehingga sekaligus sektor pertanian dapat menjadi unsur pelopor dalam proses pembangunan.
10. Dalam proses pembangunan maka kebutuhan akan devisa semakin meningkat untuk membiayai bahan baku, alat-alat perlengkapan, modal dan lain-lain. Sementara itu, hutang-hutang luar negeri harus pula diangsur, sehingga memperbesar tekanan pada neraca pembayaran luar negeri. Karena prospek bagi ekspor dari produk-produk yang tradisional tidak menggembirakan dimasa depan, maka disamping usaha mengintensifkan dan mengefektifkan bidang-bidang produksi pertanian dalam arti luas, perlulah kegiatan ekonomi diarahkan pula pada usaha-usaha lain yang menghasilkan devisa (seperti pertambangan, pariwisata, dll.), dan usaha-usaha yang menghemat penggunaan devisa (seperti industri substitusi impor).
 11. Sungguhpun pada tahap sekarang diberikan prioritas yang tinggi pada sektor pertanian, namun dalam jangka panjang diicihrtikan agar struktur ekonomi Indonesia yang berat sebelah agraris dapat berkembang menjadi struktur ekonomi yang seimbang. Hal ini ingin ditjapai melalui pengembangan industri yang memproduksi barang-barang keperluan pertanian, industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan industri yang menghasilkan barang-barang pengganti impor.
 12. Buruknya prasarana ekonomi mendorong struktur biaya produksi yang tinggi, sehingga memperketat kemampuan bersaing Indonesia dipasaran dunia. Perhubungan yang tak lancar juga mengurangi kemampuan ekonomi Indonesia menjadi satu pasaran yang integral, sehingga menghambat perkembangan produksi. Buruknya prasarana ekonomi menghambat pula pembinaan Indonesia menjadi satu kesatuan politis yang tunggal. Sehingga penanggulangan dan pembangunan prasarana ekonomi merupakan sasaran perentjana yang penting.

13. Disamping meningkatkan produksi seperti tersebut diatas yang merupakan usaha pembangunan bidang materiil, maka peningkatan bidang spirituil-rochanijah perlu mendapat perhatian.

Segi agama, pendidikan, kesehatan, perumahan, rekreasi perlu memperoleh tanggapan yang tepat, sehingga mendjamin pembangunan rochanijah yang seimbang dengan pembangunan materiil.

Peningkatan prasarana sosial-politik guna mendjamin pertumbuhan ilkim yang menggairahkan pembangunan.

Politik dalam dan luar negeri, serta kebidjaksanaan Pertahanan dan Keamananpun merupakan unsur yang membantu kelantjaran proses pembangunan. Oleh karena itu pembinaannja harus diarahkan dan disesuaikan dengan arah pembangunan yang sedang ditempuh.

14. Pengangguran serta bertambahnja tenaga kerdja yang menjtari lapangan kerdja terdapat berdampingan dengan kelebihan tenaga kerdja dipelbagai unit-unit produksi.

Bertolak dari rentjana pembangunan itulah, akan dikembangkan rentjana tenaga kerdja, guna menanggapi persoalan tenaga kerdja tersebut. Baik susunan organisasi unit produksi maupun administrasi pemerintahan akan diserasikan dengan kebutuhan pembangunan.

15. Pengembangan potensi daerah mendjadi perhatian utama, sehingga usaha penjebaran penduduk dapat berlangsung sebagai bagian integral daripada kegiatan pembangunan. Pengembangan daja kreasi dan inisiatif masjarakatpun merupakan kebidjaksanaan yang sadar untuk melantjarkan usaha pembangunan, sedangkan Pemerintah terutama akan memusatkan diri pada sektor kegiatan yang bersifat strategis serta lain-lain usaha yang tidak menarik bagi swasta. Kombinasi usaha Pemerintah disektor strategis (chususnja prasarana), bersama dengan usaha daerah dan swasta (termasuk koperasi) diharapkan dapat mendorong proses pembangunan.

16. Keseluruhan usaha pembangunan ini dilangsungkan dalam rangka keseimbangan moneter sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi, serta keseimbangan neratja pembajaran tanpa memerosotkan ekonomi Indonesia semakin djauh dalam posisi hutang-hutang luar negeri yang semakin banyak. Diusahakan pula keseimbangan dalam pembangunan

jang wadjar antara Pusat dan Daerah dan keseimbangan antara pertambahan penduduk dan kesempatan kerdja.

17. Sebagai unsur jang pokok dalam penjusunan rentjana jang lebih lengkap maka kegiatan survey, design dan feasibility study merupakan kegiatan-kegiatan jang mendahului setiap usaha jang penting, sehingga setjara sadar ditempuh kebidjaksanaan survey, research, lain-lain kegiatan ilmiah jang diserasikan dengan kebutuhan pembangunan.
18. Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan daripada rentjana djangka pandjang (lima-tahunan) ini akan tertuangkan dalam Rentjana-Tahunan jang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan (policies) lainnja. Perkembangan dalam djangka waktu setahun memungkinkan penjesuaian dalam rentjana djangka pandjang kearah penjempurnaan. Sehingga sifat Rentjana Pembangunan Lima Tahun adalah dinamis. Berdasarkan pada pokok-pokok fikiran tersebut diatas, disusunlah pola dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun sebagai berikut :

A. U M U M :

I. PENGERTIAN :

Jang dimaksudkan dengan Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969 s/d 1973) meliputi Landasan, Sasaran-sasaran Pokok dan Sasaran Bidang-bidang Pembangunan dalam rangka usaha dan kegiatan Negara dan Bangsa untuk mentjapai hasil-hasil optimal jang dapat dilaksanakan dalam djangka waktu lima (5) tahun 1969 s/d 1973) sebagai pelaksanaan Program Umum Nasional.

II. LANDASAN :

Dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun ini digunakan landasan Pola Dasar Program Umum Nasional.

III. SASARAN-SASARAN POKOK :

Sasaran-sasaran pokok daripada usaha dan kegiatan pembangunan lima tahun (1969 s/d 1973) adalah Pembangunan : MENTAL, PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN, PRASARANA, LAPANGAN KERDJA.

1. Mentjiptakan suatu kondisi peri-kehidupan Bangsa jang bertakwa kepada Tuhan Jang Maha Esa, ber-

mental dan berachlak jang merupakan sumber daja gerak dan daja kreasi jang positif bagi Bangsa dan masjarakat jang membangun.

2. Meningkatkan produksi dan penjediaan pangan.
3. Meningkatkan produksi dan penjediaan sandang.
4. Sesuai dengan kemampuan jang ada, mengusahakan peningkatan penjediaan perumahan bagi Rakjat.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi prasarana.
6. Meningkatkan penjediaan lapangan kerdja disegala bidang kegiatan masjarakat.

B. S A S A R A N :

BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN :

Usaha-usaha Pokok dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini dititik-beratkan kepada bidang-bidang sebagai berikut :

BIDANG MATERIIL :

I. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN :

1. Sasaran utama dibidang pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi pangan. Disamping itu sasaran lain aadalah meningkatkan ekspor hasil perkebunan.
2. Dibidang pangan, maka perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produksi beras jang merupakan makanan pokok bagi rakjat Indonesia. Disamping itu djuga peningkatan produksi pangan lain jang menjadi sumber protein, yakni hewan, ikan dan bahan pangan lain.
3. Potensi untuk meningkatkan produksi pangan perlu didjadikan kenyataan dengan pembangunan berentjana. Dalam hubungan ini faktor-faktor jang besar pengaruhnja adalah irigasi, benih unggul, pupuk, obat hama, kegiatan penjuluhan, perangsang bagi petani, kebedjaksanaan harga, perbaikan pemasaran, lembaga perkreditan dan lain-lain. Dengan perentjana jang sesuai dari segala faktor-faktor ini, disertai keadaan iklim jang wadjar, maka produksi pangan pasti akan meningkat.
4. Benih unggul dan pupuk hanja akan memberikan hasil jang memuaskan bilamana ada air jang tjukup. Oleh karena itu untuk mensukseskan usaha pening-

katan produksi pangan, maka prioritas yang tinggi akan diberikan pada bidang irigasi, yang telah terbengkelai sedjak lama. Dientjanakan perbaikan yang ada serta penyelesaian projek-projek irigasi yang telah dimulai. Hal ini akan dilandjutkan dengan pemeliharaan yang teratur untuk seterusnya. Sementara itu diselenggarakan penelitian dan survey dari projek-projek irigasi yang baru.

5. Baik untuk perbaikan maupun untuk pemeliharaan irigasi dientjanakan untuk menggunakan sebanjak mungkin tenaga kerdja („Padat Karya”). Dengan demikian sebagian dari tenaga kerdja yang menganggur dapat ditampung. Bilamana irigasi memungkinkan panen dua kali, maka ini berarti penambahan lapangan kerdja pula.
6. Dewasa ini irigasi sedang menghadapi bahaya yang besar, yakni bahaya erosi, akibat kerusakan hutan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Tanpa pengendalian erosi, maka pembangunan irigasiasia kan sia-sia belaka. Karena itu penting sekali peranan perentjanaaan pengendalian erosi.
7. Dibidang pengembangan benih unggul telah diperoleh benih-benih PB-5 dan PB-8 yang telah ternjata mengandung potensi-potensi besar bagi peningkatan produksi. Yang diperlukan kini ialah kegiatan penju-luhan untuk emnjebarkan penggunaan benih unggul ini.
8. Penggunaan benih unggul akan memerlukan lebih banjak pupuk. Untuk keperluan ini dientjanakan peningkatan produksi pupuk, baik dengan perluasan pabrik yang sudah ada, maupun mendirikan pabrik-pabrik pupuk baru. Sementara itu impor pupuk harus terdjamin dan dientjanakan dengan setepat-tepat-nja. Demikian pula halnja dengan obat hama serta obat-obat pertanian.
9. Untuk mendorong petani agar meningkatkan produksi pangan, maka perlu adanja perangsang produksi bagi petani. Khususnja perbandingan harga pupuk yang dibeli petani dan harga padi yang dijual oleh petani memegang peranan penting. Dalam hubungan ini maka kebidjaksanaan harga pembelian padi

- oleh Pemerintah akan diserasikan dengan kebijaksanaan menstimulir produksi pangan.
10. Perentjanaan untuk memperbaiki pemasaran serta perkreditan penting pula peranannya bagi peningkatan produksi pangan. Disamping itu masalah tanah serta terdjaminnya bagian yang adil bagi petani penggarap juga mempengaruhi kegiatan berproduksi.
 11. Sementara segala usaha diarahkan kepada peningkatan produksi padi, maka keperluan untuk mengimpor beras perlu dikurangi dengan pengadaan pengganti beras, seperti „beras terigu“, „beras dja-gung“ dan lain-lain.
 12. Peningkatan produksi pangan yang merupakan sumber protein perlu direntjanakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini meliputi bidang perikanan dan peternakan juga meliputi produksi untuk ekspor.
 13. Mengenai peningkatan ekspor hasil perkebunan maka diperlukan perentjanaan yang teliti, dihubungkan dengan kemungkinan masa depan hasil perkebunan karena keadaan pasaran dunia dan keadaan perkebunan-perkebunan kita dewasa ini kurang menggembirakan.
 14. Bagi perkebunan rakyat diperlukan perentjanaan dibidang penjualan yang efektif, sedang bagi perkebunan milik Pemerintah direntjanakan berbagai tindakan untuk meningkatkan produksi perbaikan management serta memperbaiki pemasaran.
 15. Sebagian dari perkebunan yang suram masa depannya, direntjanakan untuk diganti dengan tanaman ekspor yang lain ataupun direntjanakan untuk dipergunakan bagi peningkatan produksi pangan.
 16. Perentjanaan dibidang kehutanan antara lain meliputi peningkatan produksi untuk ekspor dan penanaman kembali hutan-hutan dalam rangka pemeliharaan tanah serta pengendalian banjir. Hutan-hutan yang dibuka dapat pula dimanfaatkan dalam rangka peningkatan produksi pangan. Perlu diusahakan agar kayu hasil hutan diolah menjadi berbagai matjam bahan, diantaranya untuk bahan perumahan Rakyat.
 17. Dalam rangka peningkatan produksi pangan, maka direntjanakan kegiatan perluasan areal penanaman

(ekstensifikasi). Berdasarkan pertimbangan biaya maka pengluasan sawah pasang-surut memberikan kemungkinan-kemungkinan yang paling baik.

18. Untuk meningkatkan produksi pangan melalui pembukaan tanah baru, diperlukan pemindahan tenaga kerdja. Dalam hubungan ini diperlukan perentjanaaan transmigrasi, yang sifatnja tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan dan yang memerlukan pemindahan tenaga kerdja.
19. Perentjanaaan transmigrasi dihubungkan dengan penediaan tenaga kerdja bagi kegiatan pembukaan serta eksploitasi hutan serta kegiatan-kegiatan proyek-proyek lain yang memerlukan pemindahan tenaga kerdja.

II. INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN :

1. Untuk meningkatkan produksi pertanian, chususnja pangan, diperlukan berbagai hasil-hasil industri. Oleh karena itu maka dalam rangka peningkatan produksi pangan, maka prioritas dalam pembangunan industri diberikan kepada industri-industri yang langsung membantu peningkatan produksi pangan, yakni industri-industri yang menghasilkan pupuk, obat hama dan alat-alat pertanian.
2. Industri lain yang memperoleh prioritas ialah industri-industri yang membantu pembangunan pertanian dengan mengolah hasil-hasil pertanian, baik untuk keperluan konsumsi dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Dengan adanya pengolahan yang baik, maka produksi dibidang pertanian akan makin terdorong untuk berkembang.
3. Dalam rangka menghemat devisa untuk impor, maka penting pula pembangunan industri-industri yang menghasilkan barang-barang pengganti barang impor. Diantarannya adalah industri tekstil yang menjeadiakan bahan sandang bagi rakyat. Lain-lain industri kertas, ban dan lain-lain industri yang mengolah bahan-bahan dalam negeri.
4. Industri bahan bangunan, seperti semen, perkajuan dan sebagainya akan sangat membantu pembangunan prasarana dan sekaligus membantu pembangunan

perumahan Rakjat, jang dewasa ini sangat dirasakan belum berkembang.

5. Berhubung dengan mendesaknja masalah pengangkutan serta penambahan tenaga kerdja, maka pembangunan industri ringan dan keradjinan rakjat memperoleh perhatian utama. Kedua matjam kegiatan ini diperkembangkan didaerah-daerah pedesaan dan akan dapat menampung banjak tenaga kerdja.
6. Projek-projek industri jang kini terbelengkalai akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Management dari industri-industri milik Pemerintah akan diperbaiki. Untuk ini diperlukan penelitian serta penelaahan.
7. Bag pembangunan industri bukan sadsja diperlukan investasi, melainkan djuga berbagai tindakan tindakan dibidang pemasaran, penjediaan listrik dan lain-lain. Tindakan-tindakan ini merupakan bagian jang integral dari perentjanaaan pembangunan bidang industri.
8. Dibidang pembangunan pertambangan maka minjak-bumi memegang peranan terpenting sebagai sumber devisa jang utama. Peningkatan produksi dan ekspor serta pengolahan hasil minjak-bumi didalam negeri akan memperkuat posisi devisa negara dan karenanya akan diperkembangkan dengan seksama.
9. Pembangunan dibidang pertambangan djuga meliputi perentjanaaan peningkatan produksi timah, bauksit, nikkel, tembaga, dan lain-lain. Bahan-bahan pertambangan ini mempunyai hari depan jang baik dipasaran dunia.
10. Baik dibidang industri maupun dibidang pertambangan, maka kerdjasama dengan modal luar negeri untuk pembangunan akan dimanfaatkan.

III. P R A S A R A N A :

1. Peningkatan produksi pangan dan ekspor sangat tergantung dari keadaan prasarana. Terbelengkalainja prasarana sedjak bertahun-tahun menambah urgensi untuk memberikan prioritas kepada perentjanaaan bidang prasarana, jang antara lain meliputi bidang-bidang perhubungan darat, laut dan udara telekomunikasi, listrik dan sebagainya.

2. Dibidang perhubungan darat, maka prioritas diberikan kepada perbaikan serta up-grading dari djalan-djalan yang menghubungkan daerah-daerah produksi pangan dan daerah-daerah konsumsi pangan serta antara daerah-daerah produksi bahan ekspor dan pelabuhan-pelabuhan ekspor. Perbaikan dan up-grading ini tidak hanya meliputi djalan-djalan besar, melainkan semua djalan-djalan yang benar-benar penting bagi kelantjaran pengangkutan pangan dan bahan ekspor.
3. Disamping perbaikan dan up-grading djalan-djalan yang sudah ada maka akan dimulai penelitian dan survey yang intensif dan luas mengenai kemungkinan pengembangan djaringan djalan.
Atas dasar hasil penjelidikan tersebut, akan dimulai persiapan-persiapan pengembangan djaringan djalan.
4. Untuk dapat menggunakan djalan dengan sebaik-baiknya, maka sangat penting pula pengembangan dan pemeliharaan ini pembangunan fasilitas-fasilitas pemeliharaan alat-angkutan akan memperoleh perhatian.
5. Kereta-api mempunyai peranan ekonomi dan sosial yang penting. Karena itu perbaikan setra up-grading dari peralatan kereta-api akan ditingkatkan, sedang fasilitas pemeliharaan akan disempurnakan. Perentjanaan dibidang kereta-api dan dibidang djalan harus berdjalan serasi dalam rangka perentjanaan perhubungan umumnja.
6. Sebagai negara kepulauan, maka ekonomi Indonesia sangat tergantung dari kelantjaran perhubungan laut. Dibidang ini maka pembangunan kembali dari pelabuhan-pelabuhan serta berbagai matjam alat pembantu pelajaran, seperti perambuan, mertjusuar, dan lain-lain, akan memperoleh prioritas. Demikian pula pengerukan akan diusahakan setjara sungguh-sungguh, karena keadaan pelabuhan-pelabuhan telah semakin mundur sebagai akibat terlambatnja kegiatan pengerukan selama bertahun-tahun.
7. Selandjtunja perbaikan fasilitas galangan kapal dan peningkatan produksi kapal dalam negeri perlu di-

usahakan, baik guna melantjarkan perhubungan laut maupun guna meningkatkan kegiatan penangkapan ikan.

8. Mengingat luasnja daerah Indonesia maka pembangunan perhubungan udara adalah suatu hal jang penting. Setjara bertahap, maka perhatian akan diberikan kepada perbaikan serta up-grading dari lapangan-lapangan udara jang penting bagi lalu-lintas ekonomi. Fasilitas fisik seperti landasan, terminal, hubungan telekomunikasi, lampu-lampu dan sebagainya akan memperoleh perhatian utama. Dengan demikian frekwensi penerbangan akan dapat ditingkatkan.
9. Tahap selandjutnja adalah pembukaan djaringan pembantu (feederlines), terutama kedaerah-daerah jang sangat memerlukan. Dengan demikian hubungan antar daerah akan dapat meningkat..
10. Dibidang telekomunikasi maka perhatian diberikan pada peningkatan hubungan antara kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan jang penting, antara daerah-daerah perdagangan, antara pantai dan laut, dan antara dalam negeri dan luar negeri.
11. Pembangunan telekomunikasi jang lebih luas akan didahului dengan penelitian serta survey jang tepat, sesehingga pembangunan dilaksanakan dengan biaja jang minimal.
12. Dibidang listrik, maka kegiatan pembangunan terletak dalam penjempurnaan serta keserasian antara djaringan distribusi dan transmisi dengan pembinaan tenaga-tenaga pembangkit.
13. Bagi pembangunan selandjutnja, maka diperlukan penelaahan pilihan jang gsetepat-tepatnja antara berbagai sumber tenaga listrik diantaranya tenaga-uap, tenaga-gas, tenaga-diesel dan tenaga-air. Pilihan jang tepat berarti penghematan biaja dan dengan demikian djuga kesempatan pembangunan jang lebih luas.

IV. PARIWISATA :

1. Bagi Indonesia maka pariwisata adalah sumber penabahan devisa jang mengandung potensi besar. Karena itu bidang pariwisata memperoleh perhatian khusus dalam rangka perentjanaan pembangunan.

2. Bagi pembangunan pariwisata maka jang sangat penting ialah peningkatan perhubungan udara dan laut jang langsung antara luar negeri dan daerah-daerah pariwisata. ntuk ini diperlukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan udara serta fasilitas-fasilitas fisik lainnja, disamping memperlantjar prosedur-prosedur administratif.
3. Selandjutnja diperlukan pembangunan fasilitas-fasilitas tempat penginapan, pengangkutan setempat, prasarana dan sebagainya.
Pengembangan kebudayaan dan keradjinan Rakjat perlu ditingkatkan.
4. Dalam rangka pembangunan pariwisata maka prioritas diberikan kepada Pulau Bali. Sementara segala potensi pariwisata dari pulau Bali dikembangkan, maka daerah-daerah pariwisata jang lain, diantaranya Djawa Tengah, Danau Toba, Djawa Barat dan lain-lain, tetap dipelihara dan dipersiapkan pengembangannja.
5. Bagi pembangunan pariwisata maka sumber pembiayaan luar negeri akan dimanfaatkan sepenuhnya.

V. KESEDJAHTERAAN RAKJAT (MENTAL, SPIRITUIL, ROCHANIJAH DAN SOSIAL)

1. Perentjanaan pembangunan kesedjahteraan Rakjat meliputi berbagai bidang, antara lain bidang-bidang agama, tenaga kerdja, pendidikan, kesehatan, keluarga berentjana, perumahan, sosial, penerangan dan ilmu pengetahuan. Disamping itu djuga meliputi pembangunan desa, koperasi, administrasi pemerintahan, hukum dan pembangunan daerah.
2. Dibidang agama, maka diusahakan untuk mengembangkan dan menebalkan Iman bagi ummat jang sudah beragama, dan memperluas fasilitas-fasilitas jang diperlukan bagi pelaksanaan ibadah seperti perbaikan dan perluasan tempat-tempat beribadah, memperbanyak dan penjebaran kitab-kitab sutji, fasilitas pendidikan agama dan sebagainya, satu dan lain sesuai dengan agama masing-masing, dengan selalu memegang teguh dasar-dasar toleransi agama.

Kepada mereka jang belum beragama diusahakan untuk memberikan tuntunan agar mereka mendjadi ummat jang beragama sesuai jang kejakinkannja. Usaha-usaha tersebut diatas dilakukan dalam batas-batas kemungkinan dan dalam keseimbangan usaha dalam bidang pembangunan jang lain.

3. Dibidang tenaga kerdja, maka sasaran adalah meningkatkan kesempatan kerdja untuk mengurangi pengangguran dan menampung tambahan tenaga kerdja. Untuk ini direntjanakan untuk mendorong kegiatan-kegiatan jang dapat menampung banjak tenaga kerdja baik didesa-desa maupun dikota-kota dibidang pertanian dan dibidang industri.
Dalam membangun projek-projek ditjari tjara-tjara jang menggunakan tenaga kerdja, satu dan lain tanpa mengurangi efisiensi.
4. Masalah lain dibidang tenaga-tenaga terdiik kela-pangan-lapangan jang memerlukanja.
Dalam hal ini diperlukan keserasian antara perentjana-an bidang kegiatan dan perentjanaan tenaga kerdja. Dengan demikian kebutuhan dan penjediaan tenaga terdidik dimasing-masing bidang dapat disesuaikan.
5. Dibidang pendidikan direntjanakan agar perkembangan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena prioritas utama (diberikan) kepada bidang pertanian, maka pendidikan pertanian memperoleh perhatian utama. Disamping itu pendidikan kedjuruan-kedjuruan lain perlu pula dikembangkan dengan pesat. Pendidikan agama merupakan mata peladjaran wadjab disekolah-sekolah dasar sampai dengan Universitas-universitas, jang pelaksanaannja perlu diatur dengan Undang-undang.
6. Untuk memungkinkan pengluasan kesempatan bersekolah, maka djumlah guru perlu ditingkatkan, antara lain dengan djalan menambah sekolah-sekolah guru, memindahkan tenaga-tenaga dari bidang-bidang lain kebidang pendidikan dengan disertai latihan setjukupnja, mendorong tenaga-tenaga dibidang-bidang lain untuk membantu tugas pendidikan pada waktu luang dan sebagainya.

7. Keseimbangan jang lebih sehat antara pendidikan umum dan pendidikan kedjuruan akan diusahakan dengan berentjana, sehingga benar-benar mendjadi kenjataan dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
8. Pendidikan orang dewasa direntjanakan agar dapat meluas dengan tjepat. Agar mentjapai hasil-hasil jang permanen maka pemberantasan buta huruf akan dilandjutkan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan ketrampilan jang sesuai dengan kebutuhan, antara lain pertanian pertukangan, perikanan, peternakan dan sebagainya.
9. Dibidang perguruan tinggi prioritas djuga disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Selandjutnja disamping pendidikan maka kegiatan penelitian dikembangkan. Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat maka kegiatan membantu pembangunan desa akan ditingkatkan.
10. Mengingat besarnya beban pembiajaan pendidikan, maka perlu direntjanakan pembagian beban pembiajaan jang esrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua Murid.
11. Dibidang kesehatan maka diutamakan pemberantasan penjakit-penjakit menular jang menimbulkan banjak korban dan/atau sangat mengurangi produktivitas kerdja. Disamping itu perhatian utama diberikan kepada pengluasan pusat-pusat kesehatan bagi pengobatan dan perawatan, baik didaerah-daerah pedusunan maupun dikota-kota. Untuk dapat memberikan pelajaran jang lebih banjak maka pendidikan tenaga-tenaga para-medis (perawat dan lain-lain tenaga pembantu) akan ditingkatkan. Penjebaran tenaga kesehatan diusahakan agar merata.
12. Penjedian obat-obatan ditingkatkan, sedang produksi obat-obatan didalam negeri distimulir, termasuk produksi obat-obatan asli. Dalam pembangunan fasilitas kesehatan serta produksi obat-obatan, maka bantuan dan kerdjasama luar negeri dibidang kesehatan akan dimanfaatkan sepenuhnya.
13. Dalam bidang keluarga berentjana maka tudjuannja ialah memberikan pengetahuan serta kesempatan

kepada masing-masing keluarga untuk setjara suka-rela menetapkan sendiri besarnja keluarga, dalam rangka usaha meningkatkan kesedjahteraan keluarga, serta kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini merupakan kegiatan masjarakat jang memperoleh bantuan dan dorongan Pemerintah.

14. Dibidang perumahan, maka direntjanakan berbagai langkah-langkah untuk meningkatkan keadaan perumahan Rakjat dalam batas-batas kemampuan pembiayaan. Antara lain ditingkatkan kegiatan penju-luhan dan bantuan tehnik dalam pembangunan perumahan Rakjat jang sehat, kuat dan murah. Dikota-kota diusahakan perbaikan fasilitas fisik dalam rangka perentjanaan tatakota dan meliputi tanah, saluran air, pembuangan kotoran dan sebagainya.
16. Dibidang kesedjahteraan sosial, diusahakan peningkatan kegiatan-kegiatan jang menjangkut kesedjahteraan keluarga serta bantuan bagi para tuna-karya, tuna-netra dan lain-lain penderita. Dengan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang tepat dibidang ini maka dapat ditimbulkan perubahan-perubahan sosial (sosial change) jang akan menambah kelantjaran pembangunan dan dilain fihak djuga akan mengurangi akibat-akibat negatif jang biasanja menjertai pertumbuhan ekonomi dan sosial.
17. Pembangunan dibidang penerangan diarahkan kepada pengembangan fasilitas mass-media jang sehat dan meningkat, agar supaja seluruh masjarakat dapat tumbuh kearah kegiatan membangun serta tertiapainja dialoog jang sehat diantara lapisan masjarakat serta antara masjarakat dan Pemerintah melalui media penerangan.
18. Ilmu pengetahuan dan tehnologi distimulir sehingga berkembang dengan tjepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam hubungan ini maka reseach memegang peranan penting. Kerdjasama Internasional dibidang ini akan dimanfaatkan sepenuhnya.
19. Sehubungan dengan perkembangan research, maka kegiatan survey serta pengembangan statistik perlu direntjanakan. Pengumpulan serta pengolahan ba-

han-bahan ini merupakan landasan jang kuat bagi usaha pembangunan jang terarah.

20. Perhatian penuh diberikan kepada pembangunan desa. Perentjanaan pembangunan desa harus bersifat menjeluruh meliputi berbagai segi kehidupan desa. Peningkatan daja membangun didesa membawa dorongan jang langsung kepada kegiatan disegala bidang. Jang penting ialah ikut sertanja Rakjat di-desa dalam usaha-usaha memperbaiki taraf kehidupannya dengan sebanjak mungkin berlandaskan prakarsa sendiri serta disediakannya bantuan-bantuan tehnis dan lain-lain. Dengan tjara jang mendorong swadaja dan kegotong-rojongan, sehingga bantuan-bantuan itu bertambah efektif.
21. Peningkatan Pembangunan desa akan menambah lapangan bekerdja dan pendapatan. Dengan demikian mungkin dapat pula mengurangi arus urbanisasi kekota-keta.
22. Perkembangan koperasi perlu direntjanakan agar kekeliruan dan penjelewengan dimasa lampau diperbaiki dan dihindarkan. Dengan pulihnja kepertjajaan masjarakat, maka koperasi dapat berkembang menjadi alat pendorong pembangunan.
23. Untuk mendjamin hasil jang maksimal dari pelaksanaan rentjana pembangunan maka penjemputnaan administrasi Pemerintah merupakan suatu keharusan. Dalam hubungan ini maka perlu dilakukan pembinaan struktural, organisatoris, personalia, mental dan pendidikan serta sistim gadji dalam administrasi Pemerintah sehingga mampu mendjalankan fungsinya selaku lembaga pembangunan jang aktif dan efektif.
24. Dalam mendjalankan fungsi pembangunan, adalah penting apabila aparat Pemerintah memberikan pengarahan serta dorongan kepada pembangunan tanpa penguasaan atau pengurusan langsung. Tjampur tangan langsung oleh aparat Pemerintah terutama dalam mengatur perusahaan-perusahaan harus sangat dibatasi. Kepada perusahaan-perusahaan negara harus diberi kesempatan untuk memungkinkan pe-

rombakan institusionil jang memberi kemampuan pertumbuhannja setjara maksimal.

25. Disamping pelaksanaan usaha-usaha administrasi Pemerintahan tidak kurang pentingnja adalah peningkatan pengawasan dan kontrol jang lebih ketat dari lembaga-lembaga kontrol jang sjah kedudukan hukumnja, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Direktorat Akuntan Negara, dan lain-lain. Penjempurnaan organisasi, tata-kerdja, serta personalia merupakan persjaratan bagi peningkatan pengawasan keuangan tersebut.
26. Dibidang hukum diusahakan pengembangan hukum nasional serta perwujudan daripada tertib-hukum. Disamping penjempurnaan-penjempurnaan institusionil maka kesadaran hukum masjarakat senantiasa dipupuk dan sikap para penguasa dan pedjabat Pemerintahan selalu dibina kearah menegakkan hukum, keadilan dan ketertiban.
27. Pola Pembangunan Nasional akan tersebar didaerah-daerah sesuai dengan adanja sumber-sumber pembangunan. Disamping itu daerah-daerah djuga mengusahakan kegiatan pembangunan dengan pembiajaan sendiri. Keseluruhannja ini perlu diserasikan dalam suatu pola pembangunan daerah. Untuk keperluan ini disusun pola kemungkinan perkembangan „bagi setiap daerah”.
28. Dibidang pembangunan daerah maka Irian Barat akan mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam rangka peningkatan kehidupan sosial.

VI. HANKAM :

1. Pembangunan dibidang HANKAM diberikan tekanan kepada pemeliharaan kekuatan minimal sesuai dengan Konsep Strategi HANKAM serta dalam batas-batas kemampuan pembiajaan Negara.
2. Diselenggarakan pengembangan integrasi ABRI sehingga ABRI setjara bulat merupakan alat kekuatan jang kompak dan efisien.

3. Civic Action ABRI diarahkan kepada usaha untuk menundjang pelaksanaan rentjana pembangunan lima tahun, baik dalam aspek spirituil maupun materiil. Didalam hal ini penggunaan tenaga ABRI dalam bidang pembangunan prasarana dan ekstensifikasi produksi pangan akan mendapat perhatian khusus.
 4. Diselenggarakan kegiatan pengamanan usaha dan kegiatan dibidang pembangunan.
-

LAMPIRAN IV :

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 319 Tahun 1968**

tentang

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
1. bahwa tudjuan perdjoangan Orde Baru adalah meningkatkan tingkat kehidupan Rakjat Indonesia, jang hanja dapat ditjapai dengan pelaksanaan pembangunan bertahap dan berentjana ;
 2. bahwa hasil-hasil jang telah ditjapai dalam program stabilisasi politik dan ekonomi, dewasa ini telah merupakan landasan jang tjukup kuat guna pelaksanaan pembangunan ;
 3. bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendjadi salah satu tugas Kabinet Pembangunan ;
 4. bahwa dewasa ini Pemerintah telah berhasil menjiapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973, jang akan mendjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Ketetapan MPRS tersebut tahun-demi-tahun ;
 5. bahwa berdasarkan hal-hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 ;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ajat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968 ;
- Mendengar :** Pertimbangan BAPPENAS dan Sidang-Sidang Kabinet ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969 — 1973.

Pasal 1.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II, dan III lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti yang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun, akan dituangkan dalam Rentjana Tahunan yang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan lainnja.

Pasal 3.

Penuangan dalam Rentjana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan penjesuaian terhadap Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30 Desember 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.



POLA DASAR PROGRA

ASPEK PENGARUH
BEDJARAH PERKEMBANGAN BANGSA

LANDASAN
IDIL
PANTJASILA

DETERMINAN

1. FAKTOR
GEOGRAFI
HIDOGRAFI
GEOLOGI &
TOPOGRAFI
2. FAKTOR
KLIMATOLOGI
3. FAKTOR
FLORA &
FAUNA
4. FAKTOR
DEMOGRAFI
5. FAKTOR
KEMUNGKINAN
PENGEMBANGAN

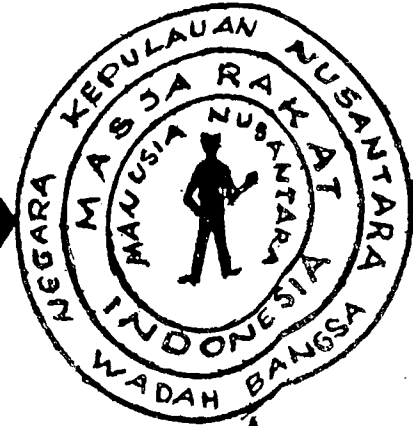
MODAL DASAR

I. POTENSI NASIONAL POTENSIL

1. KEKAYAAN ALAM
(DARAT, LAUT, UDARA)
2. MAN POWER
(TENAGA KERDJA)
(SANGAT BESAR)
3. IKLIM & TJUATJA
JG. MENJUBURKAN

II POTENSI NASIONAL EFEKTIF

4. HASIL 2 EFEKTIF
DLM. BID. SPIRITUAL
& MATERIL
5. KEMERDEKAAN &
KEDAULATAN BNGS.
6. KEMUNGKINAN &
KEMAMPUAN PE -
NGEMBANGAN
SEGALA BIDANG

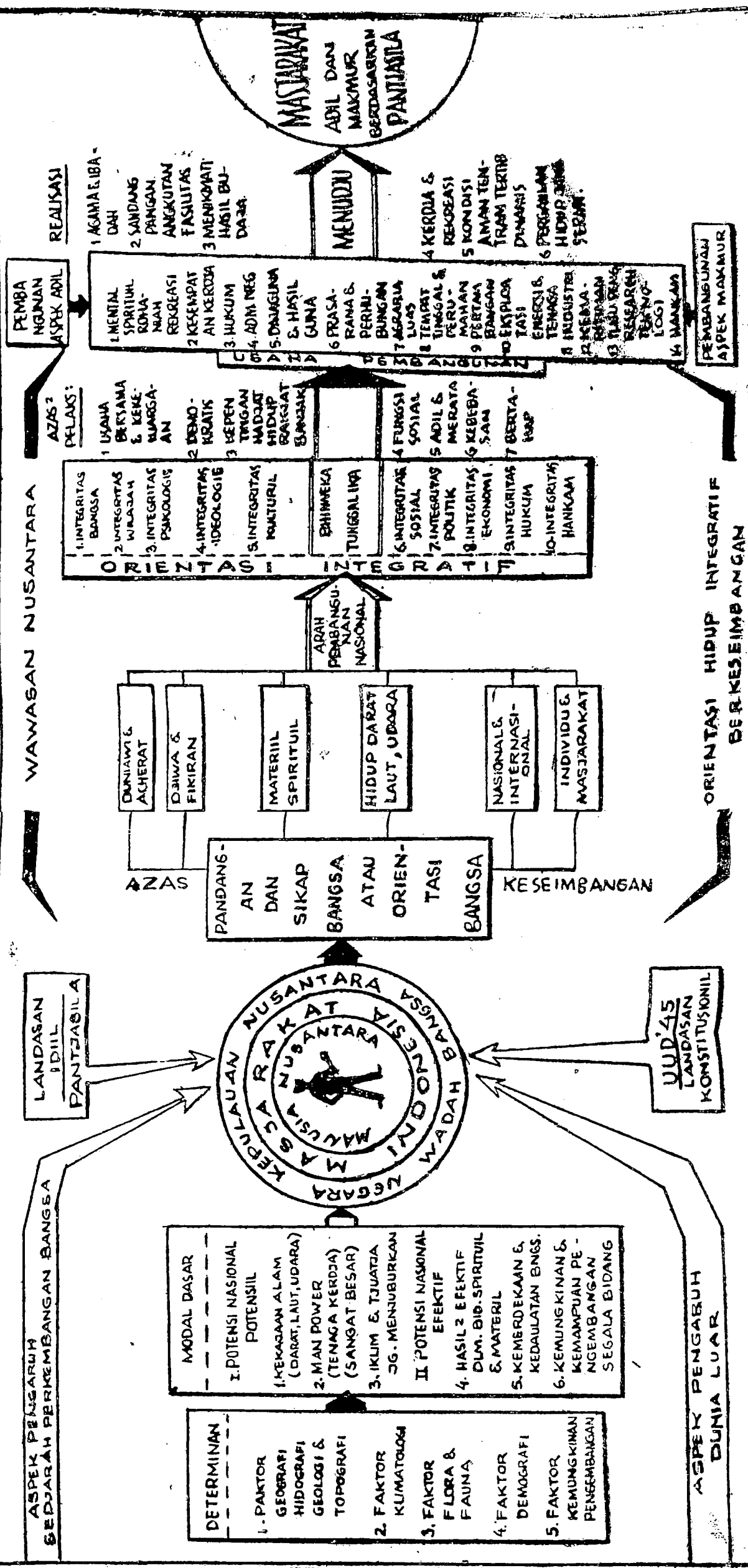


PANE
AI
DA
SIK
BAN
A
OR
T
BAN

ASPEK PENGARUH
DUNIA LUAR

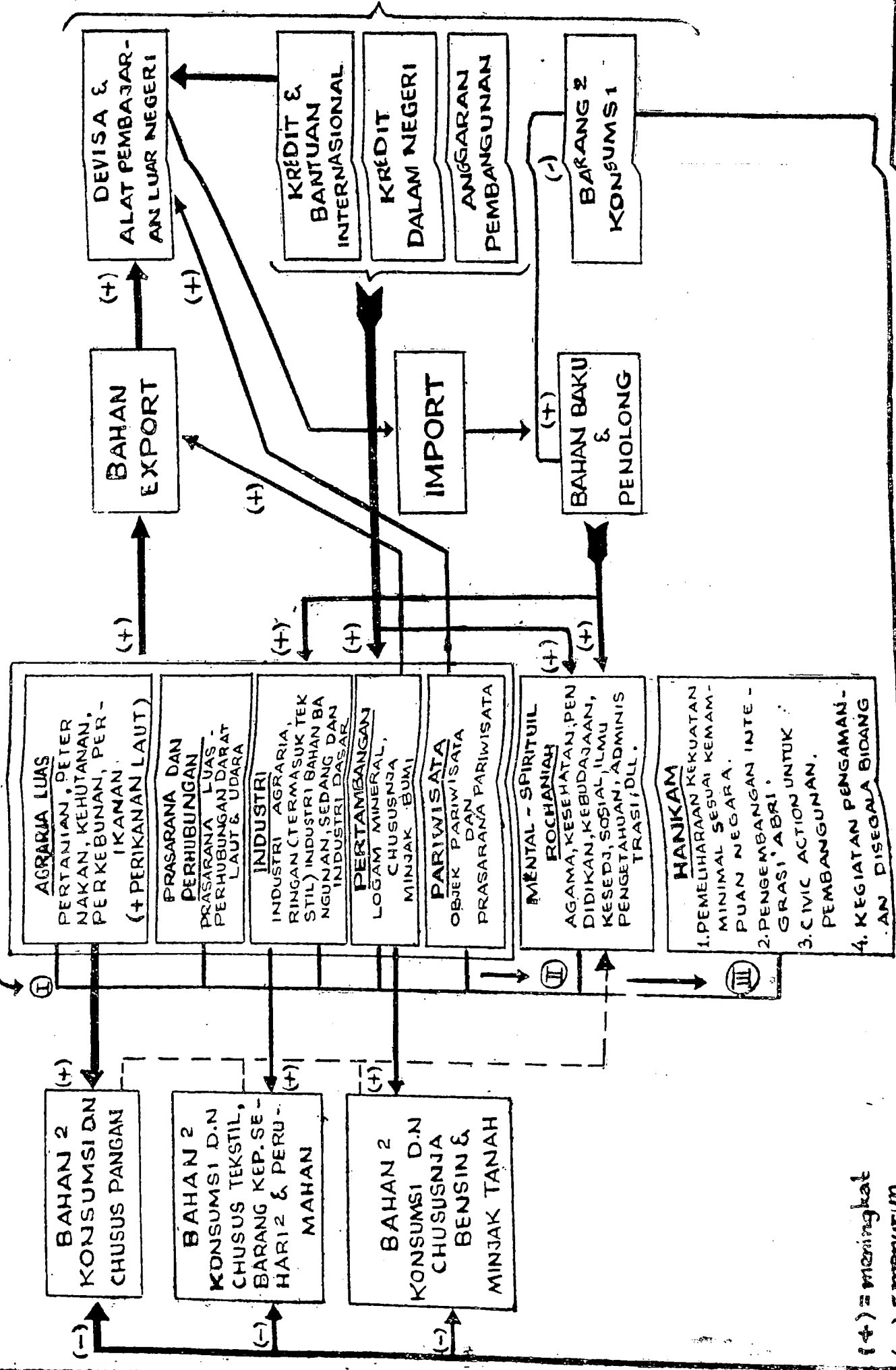
UUD '45
LANDASAN
KONSTITUSIONAL

POLA DASAR PROGRAM UMAUM NASIONAL



POLA DASAR RENTJANA PEMBANGUNAN 5 TAHUN 1969 - 1973 MENTAL, PANGAN, SANDANG, PAPAN, PRASARANA, LAPANGAN KERDJA.

AKSEN PEMBANGUNAN



POKOK 2 KEBIDJAK SANAAN PELAKSA NAAN UNTUK TIAP2 TAHUN DITENTUKAN OLEH DPR & PEMERINTAH, DI - TUANGKAN DALAM BENTUK RAPBN & KEBIDJAKSA - NAAN (POLICIES) LAINNJA